

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia 2011



# STUDI EVALUATIF

## *Pelaksanaan*

# POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

DI PENGADILAN AGAMA  
DI JAWA TENGAH



Drs. H. Musahadi, M.Ag.  
Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
Moh Arifin, S.Ag. M.Hum.

**HASIL PENELITIAN  
KOMPETITIF KOLEKTIF 2011**

**“STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN  
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
DI PENGADILAN AGAMA  
DI - JAWA TENGAH”.**



**Tim Peneliti**

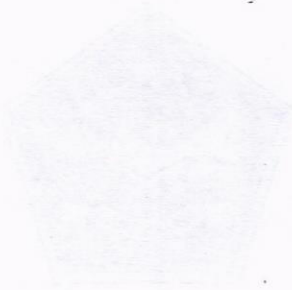
**Drs. H. Musahadi, M.Ag.  
Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
Moh Arifin, S.Ag. M.Hum.**

**PENELITIAN MENDAPAT BANTUAN DARI  
DIPA KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2011**



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN  
POSBAKUM (POSBAKUM)  
DI PANGKALAN AGAMA  
DI JAWA BARAT



Disusun oleh

Dr. H. H. H. H. H.

Disetujui oleh

Dr. H. H. H. H. H.

KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

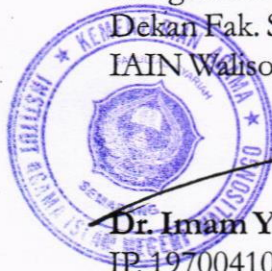
## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian	Studi Evaluatif Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama di - Jawa Tengah
Kelompok Penelitian	Penelitian Kompetitif Kolektif
Jenis Penelitian	Sosial Keagamaan
Tim Peneliti	Ketua : Drs. H. Musahadi, M. Ag Anggota : Achmad Arief Budiman, M.Ag Moh Arifin, S.Ag. M.Hum.
Lembaga Pengusul	Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Alamat Surat	Jl. Prof Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax (024) 7610291
Total biaya	Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
Jangka Waktu	6 (Enam) Bulan

Semarang, 30 Desember 2011

Mengetahui

Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Walisongo



**Dr. Imam Yahya, M.Ag.**  
IP. 197004101995031001

Ketua Peneliti,

**Drs. H. Musahadi, M.Ag.**  
NIP. 196907091994031003



<p>1. Nama Lengkap : ...</p> <p>2. NPM : ...</p> <p>3. Kelas : ...</p>	
<p>4. Tanggal Pengisian : ...</p> <p>5. Lokasi Pengisian : ...</p>	
<p>6. Nama Instansi : ...</p> <p>7. Alamat : ...</p>	
<p>8. Nama Kepala Instansi : ...</p> <p>9. Nama Kepala Bidang : ...</p>	
<p>10. Nama Kepala Sub Bidang : ...</p> <p>11. Nama Kepala Seksi : ...</p>	
<p>12. Nama Kepala Sub Seksi : ...</p> <p>13. Nama Kepala Urusan : ...</p>	
<p>14. Nama Kepala Urusan : ...</p> <p>15. Nama Kepala Urusan : ...</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan alhamdulillah karena penelitian ini telah dapat diselesaikan sesuai rencana. Pemilihan tema penelitian mengenai Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama di Jawa Tengah memiliki relevansi pembahasan terkait dengan konteks saat ini.

Kebijakan negara dalam pembangunan hukum memberi penekanan pada semakin pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

*Concern* pembangunan hukum yang berorientasi pada pemerataan keadilan tersebut ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai UU dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa



jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan, perkara *prodeo* serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarginalkan terhadap pengadilan.

Kami menyadari bahwa kajian dalam penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, terutama diakibatkan oleh jangka waktu penelitian yang masih kurang. Karena itu kami mengharapkan kritik konstruktif untuk pembenahan hasil penelitian ini.

Tidak lupa pula kami mengucapkan beribu terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini antara lain:

1. Kemenag RI Pusat
2. Pengadilan Agama Semarang
3. Pengadilan Agama Brebes
4. LPKBHI
5. Lembaga Bantuan Hukum Brebes
6. Semua pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu

Pada akhirnya kami berharap agar hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam penegakan hukum pada umumnya, dan peningkatan pelayanan bantuan hukum di pengadilan.

*Tim Peneliti*

# DAFTAR ISI

## BAB I

### PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Signifikansi Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Kerangka Teoritik .....	15
1. Pengertian .....	15
2. Dasar Hukum .....	17
3. Tujuan Bantuan Hukum .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
H. Desain Penelitian .....	24
I. Jadwal Penelitian .....	25

## BAB II

### KONSEPSI BANTUAN HUKUM

DI INDONESIA .....	27
A. Pengertian dan Dasar Bantuan Hukum .....	27
B. Bantuan Hukum di Indonesia .....	30
C. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	35



D. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin .....	47
E. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) .....	59
1. Latar-belakang POSBAKUM .....	59
2. Tujuan POSBAKUM .....	65

### **BAB III**

#### **LEMBAGA PELAKSANA**

#### **LAYANAN POSBAKUM** 69

A. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) .....	69
1. Sejarah Berdiri .....	69
2. Struktur Pengurus LPKBHI .....	70
3. Kiprah LPKBHI .....	73
4. SOP Penanganan Perkara LPKBHI .....	77
5. Pedoman Umum (AD) LPKBHI .....	79
B. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes .....	82
1. Sejarah Berdiri .....	82
2. Struktur Organisasi .....	83
3. Kiprah Lembaga .....	86

### **BAB IV**

#### **PROFIL PELAKSANAAN**

#### **JASA LAYANAN POSBAKUM** 89

A. Profil SDM Pelaksana Jasa Layanan POSBAKUM .....	89
1. Pengadilan Agama Semarang .....	89
2. Pengadilan Agama Brebes .....	109
B. Porsi dan Cakupan Layanan POSBAKUM .....	115
C. Sebaran Perkara Layanan Jasa POSBAKUM ...	136
D. Kontribusi POSBAKUM .....	

Terhadap Penegakan Hukum .....	145
1. Pengadilan .....	145
2. Masyarakat .....	146
 <b>BAB V</b>	
<b>PROBLEM PELAKSANAAN POSBAKUM</b> .....	147
A. Problem Non Judisial .....	148
1. Fasilitas .....	148
2. Waktu .....	150
3. Sosialisasi .....	151
B. Problem Judisial .....	152
1. Penentuan Kategori Masyarakat Miskin .....	152
2. Perkara-perkara yang Komplek .....	155
 <b>BAB VI</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	157
F. Kesimpulan .....	157
G. Rekomendasi .....	158





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia tentu memiliki komitmen untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini negara bertanggung-jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Negara juga berkewajiban untuk mengatur agar bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara bisa berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Mulai awal tahun 2011 Mahkamah Agung menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di seluruh Indonesia. Termasuk juga di Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang terletak di 4 (empat) tempat yaitu; Pengadilan Agama Semarang, Purwodadi, Brebes dan Wonosobo. POSBAKUM disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak (*fair and*

*impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negara nya di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusinya. Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UUD 1945 juga mengakui hak kebebasan setiap orang.

Perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun tidak dibenarkan dan mereka berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan itu. Tanggungjawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui ikhtiar-ikhtiar ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan.

Tentu, pendampingan hukum dan atau bantuan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari



perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Bantuan hukum adalah media bagi warga negara yang tidak mampu untuk memiliki akses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara struktural.

Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, mencari keadilan di pengadilan dibutuhkan biaya, sehingga seringkali masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi mengalami kendala untuk



mendapatkan keadilan, belum lagi jika dihadapkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa advokat, sehingga nyaris mereka tidak dapat mendapatkan keadilan dalam persoalan yang mereka hadapi.

POSBAKUM yang mengemban tugas memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat tersebut mulai ada sejak awal tahun 2011. Dalam rangka inilah Pos Bantuan Hukum perlu disediakan

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum dan bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan.

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No.10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama. Sedangkan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenhukham.

POSBAKUM bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pengadilan Agama sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran

bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.

Dalam menjalankan pemberian pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas, dan perlindungan anak.

Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian Advis dan konsultasi hukum. Untuk tugas yang demikian maka POSBAKUM berjalan dengan ketentuan:

- a. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- b. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- c. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- d. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukan ke Ketua Pengadilan Agama.
- e. Berhak mendapatkan sarana prasarana serta imbalan jasa

- f. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas

Petugas pemberi bantuan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama.

Sedangkan prosedur pelayanan yang dilakukan setelah formulir diisi permohonan bantuan hukum, maka disertai dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau kepala Desa; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.



Standar pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Sedangkan indikator kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama setiap bulan.

Dalam melaksanakan bantuan hukum, petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersifat sopan dan ramah serta menjunjung nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberi keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum



dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan permohonan bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di POSBAKUM, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
- g. Pemberian bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, harus dilandasi dengan sifat saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberi perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab

untuk memberi informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

Mengingat POSBAKUM ini merupakan program baru, maka ada kebutuhan untuk melihat sejauhmana aspek-aspek ideal dari proses pelayanan POSBAKUM sebagaimana dituangkan secara normatif dalam ketentuan tersebut bisa diimplementasikan secara baik di lapangan. Berdasar hal tersebut, maka dipandang perlu kiranya untuk dilaksanakan penelitian dengan judul “STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA DI - JAWA TENGAH”.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah”. Permasalahan pokok tersebut dirinci dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah
2. Bagaimana porsi dan cakupan layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah
3. Bagaimana sebaran perkara yang dilayani melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah
4. Bagaimana kontribusi layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah terhadap pembangunan hukum

5. Apa saja problem-problem yang muncul dalam layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah

### **C. Tujuan**

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi empiris mengenai pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah". Tujuan ini dielaborasi dalam beberapa tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui profil Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui porsi dan cakupan layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui sebaran perkara yang dilayani melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah
4. Untuk mengetahui kontribusi layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah terhadap pembangunan hukum
5. Untuk mengetahui problem-problem yang muncul dalam layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah

### **D. Signifikansi Penelitian**

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga macam kontribusi, yaitu kontribusi empiris, teoritis dan kebijakan:

1. Kontribusi empiris, yaitu analisis terhadap program pelaksanaan POSBAKUM secara profesional dan



sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan. Penelitian diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan POSBAKUM, sehingga masyarakat semakin termotivasi dalam memanfaatkan POSBAKUM dalam mencari keadilan.

2. Kontribusi teoritis, yaitu dengan meneliti model pelaksanaan POSBAKUM, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan model pelaksanaan POSBAKUM yang efektif dalam memfasilitasi bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Kontribusi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam merumuskan bentuk POSBAKUM bagi masyarakat tidak mampu secara lebih efektif.

## E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai pemberian bantuan hukum di pengadilan telah beberapa kali dilakukan, baik yang berupa penelitian, buku, dan makalah. Masing-masing memiliki sudut perspektif yang berbeda dalam melihat persoalan ini. Kajian tentang bantuan hukum tersebut antara lain:

*Pertama*, penelitian mengenai “*Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Pengadilan*” pada tahun 2011.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan

---

<sup>1</sup> <http://www.pt-palangkaraya.net>



Hukum dan Peradilan (PUSLITBANGKUMDIL) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Penelitian memfokuskan kajian pelaksanaan bantuan hukum di pengadilan Palangkaraya Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama yang mengambil sampel di Palangkaraya perlu dioptimalisasikan. Hal ini dikarenakan, para pencari keadilan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Kedua, tesis S2 yang ditulis oleh Hendra Andy Satya Gurning dari Universitas Indonesia mengenai "*Kajian Hukum Atas Pelaksanaan Sistem Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Antarnegara di Indonesia*".<sup>2</sup> Tesis ini menunjukkan bahwa sistem bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance*) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (*transnasional crime*).

Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antar negara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indo-

---

<sup>2</sup> <http://www.digilib.ui.ac.id>

nesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia.

Dalam tesis ini, dikaji pelaksanaan sistem bantuan timbal balik antarnegara di Indonesia dari 4 (empat) aspek yaitu: *Pertama*, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum; *Kedua*, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antar negara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; *Ketiga*, Hubungan antar kewenangan penegakan hukum harus lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*); dan *Keempat*, adalah bentuk sistem bantuan timbal balik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan *Good Governance*. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini.

*Ketiga*, studi yang berjudul “*Bantuan Hukum: Arti dan Perannya*”, yang ditulis Erman Suparman dan



Todung Mulya Lubis.<sup>3</sup> Bagi negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Juga kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akan jelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Kalau ini benar, maka timbul pertanyaan: sampai sejauh mana sistem kekuasaan di negara berkembang memungkinkan berkembangnya ide bantuan hukum. Sampai di mana masyarakat setempat membutuhkan bantuan hukum yang berlaku. Dalam tulisan ini, penulis akan memulai pembahasan dari pertanyaan yang terakhir sepanjang menyangkut peranan bantuan hukum dan seberapa dapat, mencoba menyinggung pertanyaan pertama.

Persoalannya memang begitu gawat, menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam proses peradilan, tetapi justru suatu proses pendidikan hukum (*legal education*): bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum (*legal consciousness*) agar masyarakat mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum di masyarakat. Proses pendidikan hukum ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengintrodusir nilai-nilai baru yang berguna tidak saja secara hukum, tetapi menyangkut banyak segi lain, lebih-lebih aspek

---

<sup>3</sup> *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun II, Desember 1973.

ekonomis, terutama kalau kita hubungkan dengan kenyataan-kenyataan sosial, bahwa kita memang sedang menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pembagian pendapatan yang merata sesuai dengan sila keadilan sosial.

Dari skema pembahasan di atas, belum ada penelitian yang memfokuskan pada kajian mengenai pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang menyelenggarakan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Dengan demikian, dalam konteks efektifitas pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Agama belum banyak dikaji, karenanya menjadi relevan untuk diteliti.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Pengertian

Bantuan hukum (*legal aid*) berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa menghadapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka



pengadilan (*litigation*) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (*non litigation*).

Unsur-unsur dari bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1) Adanya jasa hukum;

Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaan-pembelaan yang dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam perkara pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan

Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di pengadilan

2) Tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan;

Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan.

3) Adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

Memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu tetapi jangan diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dan keadilan sosial.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1), menyebutkan: “*Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.*”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 menyebutkan: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut.....*”

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 ayat (1) “*Adokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*”

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56 menyebutkan:

- (1) *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*
- (2) *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.*

Pasal 57 menyebutkan:

- (1) *Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.*
  - (2) *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
  - (3) *Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Pasal 54 menyebutkan:

“*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*”

Pasal 55 menyebutkan:



*“Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum.”*

Pasal 56 ayat 1 menyebutkan:

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”*

### **3. Tujuan Bantuan Hukum**

Tujuan bantuan hukum pada negara-negara berkembang pada dasarnya mengadopsi tujuan bantuan hukum di negara-negara barat, yaitu:

- a. Untuk menjalankan fungsi dan integritas peradilan yang baik.
- b. Bantuan hukum merupakan tuntutan perikemansusiaan.
- c. Untuk membangun satu kesatuan sistem hukum nasional.
- d. Untuk melaksanakan secara efektif peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk kepentingan warga tidak mampu atau miskin.
- e. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
- f. Untuk memperkuat profesi hukum.



Di Indonesia, berdasarkan pada anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum, bantuan hukum mempunyai tiga tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum yang semuanya merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Tujuan bantuan hukum tersebut adalah:

1. Untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
2. Untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
3. Untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan dari bantuan hukum ini adalah meringankan biaya yang harus ditanggung oleh warga tak mampu di pengadilan serta memberikan kesempatan yang merata kepada warga tak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Pasal 20 Sema Nomor 10/2010 menyebutkan bahwa syarat-syarat memperoleh jasa dari pos bantuan hukum adalah masyarakat yang tidak mampu. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/ Gampong; atau

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti.<sup>4</sup> Penelitian dilakukan pada lokasi/wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang menyelenggarakan program POSBAKUM. Dalam penelitian ini diambil sample Pengadilan Agama Semarang yang mewakili Pengadilan Agama di Kota Besar, dan Pengadilan Agama Brebes yang mewakili Pengadilan Agama Kabupaten.

### 2. Metode Pendekatan Masalah

Berpijak pada ruang lingkup masalah di atas, maka metode penelitian dilakukan dengan pendekatan secara *doktrinal* yang dilengkapi dengan pendekatan *non doktrinal*.<sup>5</sup> Kedua pendekatan tersebut merupakan

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 8-9.

<sup>5</sup> Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 56.

pendekatan kombinasi agar dapat berfungsi saling menunjang dan melengkapi (komplementaritas).<sup>6</sup> Penggunaan pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan secara objektif segala permasalahan dalam penelitian.

Kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan normatif tentang bantuan hukum. Di samping itu, pendekatan ini diperlukan untuk mengungkap makna dibalik tindakan yang dilakukan oleh responden mengenai; bagaimana mereka memahami ketentuan bantuan hukum, dan bagaimana implementasinya dalam tindakan. Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menjelaskan secara objektif atas segala permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode yang dipakai adalah wawancara mendalam secara bebas terpimpin berpedoman pada kuesioner terbuka. Penelitian ini menggali data dari pengelola POSBAKUM.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan mendalam pada permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan hukum dan pengelolaan bantuan hukum. Di samping itu, kajian mengenai

---

<sup>6</sup> Pemahaman pendekatan nondoktrinal dan doktrinal dalam metode penelitian hukum identik dengan pendekatan *yuridis sosiologis* dan *yuridis normatif*. Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 20.



pelaksanaan bantuan hukum juga menjadi kunci untuk mempertajam analisa. Dokumen-dokumen yang ditelaah berupa peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur terkait yang kesemuanya merupakan data sekunder.

c. Teknik Keabsahan Data

Selama proses pengumpulan data primer dan sekunder diupayakan pula penjagaan serta pemeriksaan keabsahan data. Terdapat empat tipe standar yang dapat dilakukan untuk menjamin kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) hasil penelitian seperti dikemukakan oleh Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba yaitu standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.<sup>7</sup>

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus secara tuntas. Sedangkan aktifitas dalam analisa data meliputi:<sup>8</sup>

- Reduksi data, yang berarti merangkum, memilah-milah, memusatkan pada hal yang penting, mencari pola dan tema.
- Penyajian data, disajikan dengan cara menyusunnya secara rapi dan sistematis dalam bentuk uraian naratif. Tujuannya agar dapat dipahami

---

<sup>7</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal. 26-30.

<sup>8</sup> Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1994, hal. 2.

dengan mudah apa yang terjadi, dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

- Kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara kemudian dilengkapi dengan data-data pendukung sehingga dapat mencapai target penelitian.

Adapun metode penelitian yang dipakai adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data.<sup>9</sup> Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan konsep bantuan hukum. Dengan penggunaan metode ini maka permasalahan penelitian ini akan dapat diungkap secara tepat.

## H. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah yang didesain sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian
  - a. Pembuatan rancangan penelitian
  - b. Pengumpulan bahan-bahan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
  - a. Melengkapi bahan penelitian dengan bahan pendukung
  - b. Analisa data

---

<sup>9</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978, hal.132.

## I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan September sampai Desember 2011, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Sept	Okto.	Nop.	Des.
1	Penyempurnaan Proposal	■			
2	Penyiapan Instrumen		■		
3	Persiapan Observasi		■		
4	Observasi Lapangan			■	
5	Edit dan Klasifikasi Data			■	
6	Verifikasi data				■
7	Penyusunan draft laporan				■
8	Diskusi dan konsultasi				■
9	Pembuatan Laporan Akhir				■
10	Seminar Hasil Penelitian				■
11	Perbaikan Laporan				■

Dengan penjadwalan di atas, diharapkan kegiatan penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur, sehingga target penelitian dapat diselesaikan dalam waktu yang direncanakan.



Kategori		Tingkat Penguasaan	
		Skor	Uraian
1	Sangat Baik	4	4.00
		3	3.00
2	Baik	2	2.00
		1	1.00
3	Cukup	0	0.00
		-1	-1.00
4	Kurang	-2	-2.00
		-3	-3.00
5	Sangat Kurang	-4	-4.00
		-5	-5.00

## BAB II

# KONSEPSI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

### A. Pengertian dan Dasar Bantuan Hukum

Sebelum membahas mengenai urgensi bantuan hukum, serta berbagai dimensi lain yang relevan dengan persoalan tersebut, perlu dilakukan pendefinisian mengenai pengertian bantuan hukum. Dalam kaitannya dengan praktek pemberian bantuan hukum, maka pengertian bantuan hukum dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

#### 1. Bantuan hukum yang diidentikkan dengan *legal services*

Bantuan hukum dalam pengertian *legal services* dimaknai dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat mampu dan tidak mampu. Pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan penyelesaian perkara secara litigasi, maka pengertian tersebut tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat diterima sebagai pelayanan hukum.

Menurut Yahya Harahap,<sup>1</sup> selain untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, *legal services* dan operasionalnya, lebih cenderung untuk

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, Jakarta: Sinar Grafik, 2003, hal. 344.

menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

2. Bantuan hukum yang disebut sebagai *legal assistance*

Menurut Todung Mulya Lubis, *legal assistance* biasanya dikonotasikan dengan pelayanan hukum atau jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat yang mampu maupun tidak mampu.<sup>2</sup>

Pengertian *legal assistance* lebih luas daripada *legal aid*, karena tujuan mereka memberi jasa bantuan hukum ditujukan bukan saja kepada orang yang mampu, namun juga ditujukan kepada maupun orang yang tidak mampu.

3. Bantuan hukum yang dikaitkan dengan *legal aid*

Menurut Black's Law Dictionary dirumuskan bahwa:

*"Countrywide system administered locally by which legal services are rendered to those and financial need and who cannot afford private counsel".*

Sementara menurut advokat senior Adnan Buyung Nasution bantuan hukum dimaksudkan sebagai bantuan hukum yang khusus diberikan kepada golongan masyarakat yang miskin.<sup>3</sup> Hal ini senada dengan

---

<sup>2</sup> Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986, hal. 3.

<sup>3</sup> Adnan Buyung Nasution, "Hukum dan Kendala Pemerataan Keadilan", dalam Artijo Alkostar ed., et.al., *Pembangunan Hukum Dalam Prespektif Positif Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, hal. 193-196.



pernyataan Oemar Seno Adji,<sup>4</sup> yang mendefinisikan bantuan hukum sebagai suatu upaya pembebasan masyarakat miskin yang tertindas. Bagi Oemar Seno Adji, bantuan hukum harus diarahkan secara sadar untuk mengubah dasar pandangan masyarakat yang telah lama terbenam dalam alam feodalisme dan paternalisme yang menindas. Sebagai suatu gerakan untuk menyadarkan golongan masyarakat miskin yang tertindas hak-haknya, maka bantuan hukum merupakan aksi kultural untuk memerdekakan masyarakat yang selama ini termarginalkan. Dengan demikian menurut Oemar Seno Adji, bantuan hukum merupakan proses pembebasan dari belenggu struktur kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang menindas.

Dari pengertian di atas *legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yang ditujukan kepada mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai pengacara sendiri. Pemberian bantuan hukum menurut konsep *legal aid* diberikan secara cuma-cuma.

Dari beberapa pengertian bantuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*legal aid*" dan "*legal assistance*". Istilah *legal aid* umumnya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma,

---

<sup>4</sup>Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985, hal. 49.

khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat dengan memberikan honorarium atas jasa hukum yang diberikannya.<sup>5</sup>

## **B. Bantuan Hukum di Indonesia**

Para *founding fathers* Negara Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Individu harus dapat menuntut negara. Kalau negara melakukan kesalahan, maka dapat dihukum oleh pengadilan dan dituntut ganti rugi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara diwakili orang c.q. pemerintah. Karena orang tidaklah sempurna dan dapat membuat kesalahan, negara harus dapat dituntut di muka pengadilan. Menurut Pembukaan UUD 1945, negara harus melindungi segenap tanah tumpah darah.

Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Penjabaran dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.

Dalam buku *Pengertian tentang Negara Hukum*, Moh. Yamin mendefinisikan negara hukum (*rechtsstaat*) atau *government of laws* sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Cendana Press, 1983, hal. 17-18.



*"Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya ber-dasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara."*<sup>6</sup>

Dari definisi mengenai negara hukum di atas, dapat dikongklusikan bahwa pemerintah di dalam menyelenggarakan kekuasaannya diatur undang-undang. Jadi, yang memerintah dalam negara hukum adalah undang-undang dan bukan orang. Tuntutan akan perlindungan yang lebih besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara.

Di dalam negara hukum, semua orang dipandang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dan semua orang harus dapat menunjuk advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk dibela kepentingannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak perlindungan hukum. Persamaan dihadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

---

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983, hal. 22.



Prinsip persamaan di mata hukum juga merupakan pengejawantahan tatanan demokratis yang dianut oleh negara Indonesia. Karena dalam negara yang mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, maka salah satu prasyaratnya adalah penerapan terhadap persamaan hak di depan hukum.

Prinsip kesetaraan di depan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) di depan hukum. Maksudnya, tidak boleh ada diskriminasi dalam negara hukum yang mengabaikan hak-hak individual maupun kolektif, untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhitungkan perbedaan latar-belakangnya, baik perbedaan atas dasar agama, etnis, gender, politik, dan sosial. Persamaan perlakuan di depan hukum termanifestasi dalam bentuk pemberian hak memperoleh bantuan hukum. Persoalan mengenai bantuan hukum merupakan tema yang menarik untuk dipelajari kaitannya dengan penegakan hukum (*rule of law*) maupun penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemberian bantuan hukum adalah persoalan yang sangat urgen dalam sebuah negara hukum. Bahwa ada jabatan pengacara, yang dengan bebas dapat menjalankan tugas kewajibannya, yang pengawasannya dilakukan oleh pengadilan, dan syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengacara dirumuskan dalam undang-undang.

Bantuan hukum di negara Indonesia diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang advokat terhadap kliennya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana di muka persidangan. Di

Indonesia, istilah bantuan hukum baru dipopulerkan sekitar tahun 1964 sejak dikeluarkannya UU Nomor 19/1964 yang secara tegas mengatur tentang bantuan hukum.

Prinsip *equality before the law* yang mengisyaratkan perlindungan bagi hak-hak asasi dalam suatu proses hukum merupakan cita-cita yang dijunjung tinggi dalam negara hukum. Namun menurut Oemar Seno Adji,<sup>7</sup> dalam mendapatkan *equality before the law* sering terdapat ironi bahwa merupakan suatu kenyataan bahwa hak-hak asasi manusia hanya dapat dinikmati oleh lingkungan orang terbatas, yaitu mereka yang mampu membiayai *legal advice*. Sementara bagi tertuduh yang tidak mampu, hak asasi itu merupakan impian yang suka dicapai. Tertuduh yang tidak mampu terpaksa menghadapi suatu proses tanpa bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dalam negara Indonesia sebagai negara hukum, suatu asas, yang memungkinkan orang yang tidak mampu untuk mendapat bantuan hukum yang wajar dari sarjana-sarjana hukum yang berpengalaman. Di samping itu, negara dan masyarakat berkewajiban agar bantuan hukum dapat diberikan dan dilaksanakan oleh para sarjana tersebut dengan rasa tanggung jawab.

Karena itu, pengakuan terhadap asas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam negara hukum, melainkan hal itu merupakan asas yang dikehendakinya. Kecuali dalam hal-hal yang eksepsional tiap putusan harus dapat dilakukan banding pada pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam penanganan perkara pidana dalam negara

---

<sup>7</sup> Oemar Seno Adji, *Loc. Cit.*



hukum seorang tertuduh mempunyai kesempatan yang *adequate* (memadai) untuk mengadakan pembelaan, yang berarti bahwa:

1. Bahwa ia setiap waktu akan dapat bantuan hukum dan dapat selalu mengadakan hubungan dengan pembela.
2. Bahwa ia diberitahu dan mengetahui tentang tuduhan yang dihadapkan kepadanya.
3. Tertuduh dapat mengajukan saksi-saksi atau keterangan-keterangan lain untuk kepentingan pembelaannya.
4. Tidak satu orang pun dapat dipaksa untuk memberatkan diri dalam suatu proses pidana. Tekanan fisik maupun psikis tidak boleh dilakukan terhadap seorang tertuduh.<sup>8</sup>

Hal demikian perlu dikemukakan dan ditegaskan karena khususnya mengenai hubungan antara seorang tertuduh dalam fase pendahuluan, dengan memberikan kesempatan pada seorang tertuduh untuk mengadakan kontak dengan pembelanya, sehingga tindakan sewenang-wenang dari seorang pejabat dapat diminimalisir.

Hak-hak asasi dari seorang tertuduh dalam suatu proses pidana harus dihormati. Hal demikian merupakan suatu keniscayaan dalam negara hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 42.



Perlindungan terhadap seseorang tertuduh dalam proses pidana perlu diadakan. Hal demikian merupakan syarat dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum merupakan prinsip yang diakui akan pentingnya oleh hukum internasional, bahkan merupakan bagian dari hak dasar yang secara asasi melekat pada setiap manusia. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hubungan bantuan hukum sebagai hak asasi manusia.

### **C. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar bagi manusia. Selama ini, penghormatan terhadap eksistensi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah penghormatan terhadap hak tersangka, masih kurang mendapatkan perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia, terutama pada waktu berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.) hingga tahun 1981. Masyarakat hukum Indonesia telah memperjuangkan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Pada sisi lain banyak insiden perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu mengakses jasa hukum dan pembelaan seorang advokat. Dalam kondisi ini bantuan hukum diperlukan untuk membela fakir miskin.

Lembaga bantuan hukum sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu,

diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

Perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk menyusun suatu hukum acara pidana nasional dapat dikatakan dimulai sejak tahun 1968 ketika diselenggarakan Seminar Hukum Nasional II. Sebenarnya dalam seminar Hukum Nasional I tahun 1963 keinginan untuk mengganti H.I.R. dengan hukum acara pidana nasional sudah pernah dikemukakan. Pada tahun 1963 suasana nasionalisme yang tinggi telah mendorong keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum nasional.<sup>10</sup> Dan, pada tahun 1961 telah didirikan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Masyarakat hukum Indonesia bertekad menggantikan hukum kolonial, yang dirasakan menindas hak warga negara Indonesia demi kepentingan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Akan tetapi, upaya mengganti H.I.R. yang diundangkan tahun 1848 yang kemudian diganti dengan teks baru tahun 1926 dan 1941 tidak tercapai selama pemerintahan orde lama selama H.I.R. berlaku, banyak terjadi kesewenangan, juga perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil yang dialami para tersangka. Penangkapan dan penahanan tidak memperhatikan hak-hak tersangka. Masyarakat hukum Indonesia tidak dapat berbuat banyak menghadapi

---

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997, hal. 18.



suasana tidak adil tersebut, hanya beberapa advokat (penasihat hukum) yang berusaha meringankan penderitaan para tersangka atau berupaya agar tersangka diadili melalui upaya-upaya hukum di pengadilan.

Pada waktu H.I.R. diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44), hal ini dianggap sebagai suatu pembaruan penting untuk tata cara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumi Putera (Non-Eropa) di Indonesia. Untuk golongan Eropa tata cara penyidikan diatur dalam peraturan lain, yang jaminan-jamainannya bagi tersangka (dan terdakwa) jauh lebih baik. H.I.R. ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu I.R (Inlandcsh reglement) yang berlaku sejak tahun 1846 (kemudian diperbarui dengan S. 1926-559). Alasan pemerintah kolonial Belanda mengubah I.R. tahun 1926 menjadi H.I.R. pada tahun 1941, adalah menurut komisi 1928 yang menangani pembaruan itu, "...keluhan yang bertahun-tahun mengenai keadaan yang berlaku, ditujukan pada satu pihak terhadap organisasi yang bertugas melakukan penuntutan pidana, yang tidak dapat memberikan jaminan adanya pendidikan yang objektif dan ahli, dan pada pihak lain ditujukan kepada penggunaan yang tidak berat atau terlalu jauh dari kewenangan perundang-undangan... termasuk upaya penangkapan, penggeledahan rumah dan penahanan sementara." Penggunaan kewenangan secara salah yang bagaimana yang dimaksud oleh Komisi yang bertugas memperbaiki kembali I.R. yang baru dua tahun disempurnakan itu?

Rupanya terhadap H.I.R. tahun 1846 (sebelum diubah dalam tahun 1926) terdapat kritik-kritik pedas



dari kalangan sarjana hukum Belanda. Hal ini menghasilkan suatu peraturan baru dengan S. 1919-689, yang mengatur kembali hal-hal yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan sementara, pemeriksaan rumah dan dokumen, prosedur sumir, dan pembebasan dengan jaminan. Tetapi, peraturan yang lebih maju ini (untuk zaman itu) yang bermaksud lebih melindungi hak-hak tersangka orang Bumiputera terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, ternyata tidak diberlakukan secara penuh dan kemudian ditunda dengan S.1920-325. sejak tahun 1906, segala rancangan yang bertujuan memperbaiki I.R. 1846 agar dapat setara dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk golongan Eropa selalu mengalami kegagalan. Karena itulah rupanya pembaruan melalui I.R. 1926 belum dianggap cukup hingga perlu dibentuk kembali komisi tahun 1928, yang menghasilkan H.I.R. dalam tahun 1941.<sup>11</sup>

Walaupun H.I.R. sudah dibentuk dengan perbaikan-perbaikan dalam proses peradilan pidana, tetapi belum sempat dipraktikkan karena tentara Jepang masuk dan selama itu H.I.R. masih diterapkan dengan semangat sebagaimana I.R. dulu karena tidak ada kesempatan bagi para penegak hukum untuk mendalami H.I.R. selama masa penjajahan Jepang (1942-1945). Selain itu mereka juga dipengaruhi kekejaman *Kenpeitai* (polisi militer Jepang) yang *fascistis*, sehingga pada masa revolusi sampai dengan KUHAP tahun 1981 H.I.R. diterapkan dengan semangat I.R.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 21-22.

sikap *Kenpeitai* itu pun tercermin dalam sikap polisi Indonesia.

Sebenarnya yang harus dikritik para ahli hukum bukanlah H.I.R. itu sendiri, tetapi kenapa para ahli hukum, termasuk para *founding fathers*, tidak memberlakukan R.V. (*Reglement op de Stravordering S. 1847-40*) saja yang berlaku bagi golongan Eropa. Kalau itu diberlakukan maka tidak akan sampai terjadi begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena di dalam R.V. (*Reglement op de Strafvordering S.1847-40*) dijumpai jaminan dibela oleh advokat yang dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap si tersangka atau terdakwa. Sewaktu KUHAP mulai diberlakukan, masih terdapat semangat H.I.R. yang dijiwai I.R. dan *Kenpeitai* (*legal spirit*), sehingga terjadilah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam Seminar Hukum Nasional II yang diselenggarakan oleh LPHN di Universitas Diponegoro 27-30 Desember 1968 yang bertemakan "Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan Demokrasi Pancasila" antara lain membahas hukum acara pidana dan hak asasi manusia dicapai suatu kesimpulan bahwa keadaan menjadi parah karena pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Lama dan diperlukan, upaya untuk mengubah hukum acara pidana kolonial (H.I.R.). Nantinya ternyata pembentukan hukum acara pidana nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) tidak banyak menolong upaya mengurangi pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa.



Diundangkannya hukum acara pidana nasional (KUHAP) pada tahun 1981 ternyata tidak membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap para tersangka dan terdakwa. Ternyata KUHAP yang dinyatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi advokat (penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur *due process of law*.

Secara umum fungsi undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut. Sebaliknya hukum yang sama juga memberikan kewenangan tertentu kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. Hukum acara pidana mengatur kewenangan polisi, jaksa, hakim, dan advokat (penasihat hukum).

Komisi III dari Seminar Hukum Nasional II memberikan petunjuk apa yang telah disepakati untuk pembentukan hukum acara pidana nasional yang akan datang. Kesepakatan ini disuarakan wakil-wakil dari



berbagai pihak dalam proses peradilan pidana dan pembentukan hukum acara pidana yang lebih manusiawi. Mereka adalah, antara lain, J.F. Katidjan (Ketua Komisi dari partai politik), Prof. Oemar Seno Adji (Menteri Kehakiman), Rusminah (Sekretaris Komisi, Direktorat Perundang-undangan Departemen Kehakiman), Surjadi (Hakim Mahkamah Agung), Kadurasman (Jaksa Agung), Nanny Razak (pembawa makalah utama: Advokat), Soemarno P. Wirjanto (Mantan hakim; dan terakhir berprofesi sebagai advokat) A. Zainal Abidin (dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Kesimpulan umum yang diperoleh adalah penegasan beberapa prinsip dan hak penting yang ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu:

1. Asas legalitas;
2. Asas praduga tak bersalah;
3. Hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan;
4. Hak-hak dalam penahanan sementara;
5. Hak minimal tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan;
6. Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang;
7. Perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan peradilan di muka umum; dan
8. Banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Prinsip dan hak-hak ilmiah yang merupakan pesan awal Orde Baru untuk dilaksanakan oleh pemerintah melalui praktik peradilan pidana yang lebih

manusiawi, baik pada masa H.I.R. (1968-1981), apalagi setelah berlakunya KUHAP (sejak 1982).<sup>12</sup>

Sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “proses hukum yang adil” atau “*due process of law*”. Lawan dari “*due process of law*” adalah “*arbitrary process*” atau “proses hukum yang sewenang-wenang”. Tobias dan Petersen dalam bukunya *A survey of A Constitutional Rights* menyatakan bahwa *due process of law* itu (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215) merupakan “*constitutional guarantee.... That no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary protects the citizen against arbitrary actions of the government*”. Oleh karena itu, menurut mereka, unsur-unsur minimal dari “*due process*” itu adalah: “*bearing counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court*” (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak).<sup>13</sup>

*Due process of law* ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dihadiahkan tersangka dan terdakwa, di mana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasihat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 26-27.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 27-28.



mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili oleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin.

Jaminan atas hak-hak seorang tersangka atau terdakwa dapat dilihat dalam dokumen Magna Charta (1215) di Inggris dan "*Declaration des droits de l'homme et du citoyen*" (1789) di Prancis, sedangkan di Amerika Serikat "*Bill of Rights*" (1791) dan amandemen keempat, kelima, dan keenam konstitusi Amerika Serikat. Semua dokumen tersebut memperhatikan dan melindungi hak tersangka dan hak terdakwa dalam proses peradilan, terutama hak hidup (*right to life*), milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*). Hak-hak warga negara tersebut paling terancam ketika ia menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dan ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang (*abus de pouvoir*). Oleh karena itu, "*due process of law*" atau "proses hukum yang adil" harus mendapatkan perhatian dan dipahami polisi, jaksa, hakim, dan advokat (penasihat hukum) dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum.

Menurut Montesquieu (1689-1755) dalam buku XII mengenai "*De l'esprit de lois*" (dikutip dari A.A.G. Peters): "Apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya."<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, hal. 29-30.



Perjuangan menjelang Revolusi Prancis (1789) telah menghasilkan sejumlah tuntutan untuk mengubah hukum acara pidana pada waktu itu, yaitu:

1. Keterbukaan proses;
2. Bantuan advokat atau penasihat hukum;
3. Penghapusan memaksa tersangka bersumpah;
4. Persamaan posisi dari para pihak (penuntut/pendakwa dan tersangka/terdakwa);
5. Pembatasan kekuasaan hakim komisaris;
6. Motivasi yang jelas dalam putusan hakim;
7. Penghapusan untuk selama-lamanya pemeriksaan dengan penyiksaan;
8. Penghapusan peradilan pidana dengan bentuk khusus;
9. Pengajuan ke muka pengadilan 24 jam setelah penangkapan dan dalam hal delik yang tidak serius pembebasan tersangka dengan jaminan;
10. Kemungkinan untuk para saksi dalam hal dikonfrontasi (dengan tersangka/terdakwa) menarik kembali keterangan yang diberikan sebelumnya tanpa ancaman pidana karena memberikan keterangan palsu.<sup>15</sup>

Negara hukum (*Rechtsstaat*) baru tercapai kalau ada pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) sejak didirikan di LBH Jakarta tahun 1971, hingga sekarang telah mempunyai 13 kantor LBH di seluruh Nusantara: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Ujung Pandang,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 30.

Manado, Medan, Jayapura, Padang, Palembang, dan Lampung—terus memperjuangkan dan telah mempunyai andil besar terhadap pendidikan rakyat untuk mengenal hak-haknya, terutama hak asasi manusia. Dalam program empat tahunnya (*four years programme*) 1994-1998 YLBHI mempunyai dua tujuan, yaitu *democratic forces in society develop* dan *Increasingly democratic system of government emerges*.

Kemudian, program empat tahun 1998-2001 berkembang menjadi tiga tujuan, yaitu:

1. *a democratic legal system develop*;
2. *people organisation and their network develop*; dan
3. *people's human rights awarness develop*.

Program empat tahun 1998-2001 diletakkan bahwa sasaran-sasaran (*goals*) yang sama dengan *Action Program*. Tujuan *Action Program* adalah “negara hukum” dan “negara yang demokratis”. Dua unsur tersebut saling melengkapi. Negara hukum tanpa dilengkapi dengan prinsip-prinsip demokrasi justru akan membawa pada upaya instrumenisasi hukum oleh negara untuk merepresi rakyatnya.

Ada empat elemen pokok yang dapat menunjukkan tercapainya tujuan ini. *Pertama*, adanya sistem-sistem ketatanegaraan yang efektif dan demokratis. Sistem ketatanegaraan semacam ini tercermin dari menguatnya berbagai mekanisme politik demokratis, yang pada gilirannya dapat menjamin adanya kontrol politik dan sosial yang efektif dari rakyat terhadap negara.



*Kedua*, negara hukum yang demokratis hanya mungkin dapat dicapai apabila rakyat memiliki kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dengan demikian penguatan institusi-institusi masyarakat sipil harus berkembang dan rakyat memiliki untuk mengorganisasi dirinya secara independen.

*Ketiga*, berkembangnya negara hukum yang demokratis juga dilandasi oleh semakin menguat dan mandirinya lembaga peradilan serta semakin berkembangnya hukum sebagai alat kontrol rakyat terhadap praktik pemerintahan.

*Keempat*, indikator penting dalam sistem demokratis adalah dapat diterimanya norma pergaulan yang menunjuk pada peng-hormatan hak asasi manusia, baik oleh negara maupun rakyat. Dengan demikian, universalitas hak asasi manusia tidak saja menjadi bagian dari aktivitas pelayanan negara dan interpretasi oleh negara, tetapi menjadi bagian dari kesadaran rakyat.

Walaupun YLBHI mempunyai andil besar dalam pengenalan dan pembelaan hak asasi manusia dan pembelaan hak rakyat, dengan segala keterbatasannya YLBHI tidak mampu menahan keruntuhan wibawa hukum dan wibawa pengadilan selama berkiprah lebih dari 25 tahun sejak berdirinya tahun 1971. Mengapa demikian? Ini disebabkan sistem hukum yang macet karena tidak ditunjang oleh kebebasan dan kemandirian pengadilan dan faktor-faktor lain yang akan diuraikan dalam bab-bab berikut ini. Campur tangan pemerintah terhadap lembaga peradilan telah menjadikan pengadilan sebagai kepanjangan tangan dan pemerintah. Yang menyedihkan adalah, upaya untuk membebaskan



lembaga peradilan tidak didukung dan datang dan para hakim sendiri tetapi justru dari para advokat (penasihat hukum), baik itu secara sporadis dan individual maupun sejak zaman PERADIN sampai IKADIN. Padahal, tanpa upaya dan inisiatif lembaga peradilan itu sendiri, mustahil keadaan dapat membaik dan kebebasan serta imparisialitas lembaga peradilan dapat dikembalikan sebagaimana cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*).

#### **D. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

Indonesia sebagai negara hukum harus dapat menjamin adanya *fair trial* dan *fair administration of justice*. Ini merupakan suatu kenyataan yang tidak mungkin disangkal.<sup>16</sup>

Prinsip negara hukum yang memandang semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, membawa konsekwensi bahwa semua orang untuk menunjuk penasihat hukum untuk dibela kepentingannya, tanpa memperhatikan status sosialnya.

Bantuan hukum terkadang diasosiasikan oleh masyarakat sebagai bentuk belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asai manusia.<sup>17</sup> Padahal, hak untuk dibela oleh advokat atau penasehat hukum (*access to legal counsel*) dalam dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equatity before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>17</sup> Abdurrohman, *Op. Cit.*, hal. 141.

suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*. Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebih mampu.

Menurut Oemar Seno Adji,<sup>18</sup> bantuan hukum adalah suatu upaya pembebasan masyarakat miskin yang tertindas. Bantuan hukum harus diarahkan secara sadar untuk mengubah dasar pandangan masyarakat yang telah lama terbenam dalam alam feodalisme dan paternalisme yang menindas. Sebagai suatu gerakan untuk menyadarkan golongan masyarakat miskin yang tertindas hak-haknya, maka bantuan hukum merupakan aksi kultural untuk memerdekakan masyarakat yang selama ini termarginalkan. Dengan demikian menurut Oemar Seno Adji, Bantuan hukum merupakan proses pembebasan dari belenggu struktur kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang menindas.

Sementara itu menurut Adnan Buyung Nasution,<sup>19</sup> perjuangan dalam memberikan bantuan hukum selalu dituntut adanya rekayasa untuk memihak kepada rakyat miskin yang lemah dan buta hukum. Kemiskinan itu harus dilihat sebagai masalah struktural, artinya ada ketidak-adilan struktural yang dipertahankan oleh stuktur kekuasaan. Perjuangan bantuan hukum harus berupaya merombak pola hubungan yang tidak adil tersebut dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat miskin dan buta hukum

---

<sup>18</sup> Oemar Seno Adji, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Adnan Buyung Nasution, "Hukum dan Kendala Pemerataan Keadilan", dalam Artijo Alkostar ed.et.al., *Pembangunan Hukum dalam Prespektif Positif Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, hal. 190.



(*legal service station*).

Pada prinsipnya perjuangan bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari keinginan menciptakan negara hukum yang demokratis sebagai realisasi dari salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemiskinan struktural yang melilit sebagian besar masyarakat dewasa ini terkait dengan ketidakmampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan hak-haknya sebagai subyek hukum. Apalagi untuk berperan serta secara aktif dalam proses pembaharuan hukum. Karenanya, menjadi porsi tugas pejuang bantuan hukum untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang pada gilirannya untuk dapat memperjuangkan hak-haknya yang diakui secara *de jure* oleh hukum.

Tegaknya hukum dan pemerataan keadilan merupakan tugas berat yang menuntut pengorbanan serta harus diperjuangkan secara terus menerus. Di negara-negara yang maju pemerataan keadilan barangkali bukan merupakan masalah, karena rata-rata tingkat pendidikan mereka relatif tinggi. Paling tidak secara elementer mereka sudah tahu akan hak-haknya, sehingga apabila ada sikap atau perbuatan yang merugikan kepentingan mereka, maka secara sadar mereka berani memperjuangkan hak-haknya tersebut tanpa rihuh.

Namun berbeda keadaannya dengan masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sebagian besar tidak sadar bahwa mereka mempunyai hak-hak dan kepentingan yang dijamin oleh hukum.



Mereka tidak tahu ada lorong-lorong hukum yang memberikan jalan untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak-haknya. Selain itu juga ada juga masyarakat yang sudah tahu dan mengerti akan adanya hak-hak membela diri, tetapi mereka enggan atau tidak mempunyai keberanian formil untuk memperjuangkannya. Berarti dalam hal ini ada kendala sikap mental yang dianut masyarakat. Sebagai contoh, sikap yang menganggap tidak sopan untuk berbicara mengenai hak-hak karena takut timbul kesan mementingkan dirinya sendiri. Ditambah lagi kuatnya feodalisme dan kukuhnya cengkraman kekuasaan yang otoriter, sehingga banyak orang yang takut berurusan dengan hukum.

Lokakarya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tahun 1982 telah merumuskan bahwa: bantuan hukum struktural lahir atas dasar pemahaman, hal keterbatasan upaya hukum dalam usaha memberantas ketidakadilan sosial, serta atas dasar penyadaran yang semakin mendalam tentang tujuan bermasyarakat dan bernegara yang sebenarnya, ialah untuk memerdekakan seluruh bangsa dalam arti seluas-luasnya seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum melalui perjuangan bantuan hukum harus selalu berorientasi menjunjung tinggi norma dan nilai hukum serta keadilan. Dengan menghimbau, mengajak, menyerukan atau mendesak (dengan kata dan perbuatan) kepada pihak lain untuk turut menghormati norma dan nilai hikim yang hakiki. Pada waktu yang bersamaan upaya tersebut menuntut peran

kreatif para pejuang hukum untuk terlibat dalam upaya penyadaran hak buruh, petani dan semua warga negara lainnya akan hak-hak mereka menurut hukum yang berlaku dan adil.<sup>20</sup>

Penegakan hukum dan pemerataan keadilan melalui bantuan hukum yang berdimensi struktural tersebut harus ditopang oleh keberanian dan integritas sikap juang yang konsisten.

Perjuangan penegakan hukum yang bersifat struktural yang dituju bukan sekedar membela orang perorangan dalam individual saja, namun tujuan akhirnya untuk memerdekakan rakyat Indonesia dari segala bentuk kemiskinan, kesewenangan dan keterbelakangan, supaya bisa berkembang dan maju menjadi manusia Indonesia yang terhormat, yang mempunyai harga diri, adil dan makmur atau berkeadilan sosial.

Dalam membela perkara ketidak-adilan yang diajukan oleh rakyat yang miskin dan buta hukum tidaklah boleh hanya bergantung pada upaya hukum formal (*formeel legalistic*), tetapi juga harus pandai mencari dan menggunakan jalan atau upaya lainnya yang sah. Dalam rangka membela dan menangani persoalan perburuhan atau masalah yang dihadapi petani-petani di desa, juga harus menyadarkan mereka akan hak-haknya yang sah (*konsientisasi*) serta mendorong mereka agar mau dan berani berjuang dan berusaha untuk membela hak-hak mereka menurut hukum dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 192-193.



keadilan, atau pun memperjuangkan nasibnya yang lebih baik.<sup>21</sup>

Upaya memperjuangkan masyarakat miskin untuk mengakses pembelaan hukum, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan pemerataan pencapaian keadilan hukum.

Terwujudnya penegakan hukum secara merata merupakan tujuan atau aspirasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang menginginkan terbentuknya pemerintahan negara demokratis atau berkedaulatan rakyat, yang menegakkan hukum serta hak asasi manusia atau melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Semua aspirasi itu tersurat dan tersirat dalam mukadimah (pembukaan) UUD 45. Ini berarti penegakan hukum memiliki dimensi struktural yang berimplikasi pada pemerataan keadilan.

Dalam kajian masalah pembangunan, para ilmuwan menemukan adanya masalah dasar yang disebut kemiskinan struktural. Struktur masyarakat adalah susunan masyarakat, pola hubungan antara unsur-unsur masyarakat. Menurut Selo Sumardjan sebagaimana dikutip oleh Adnan Buyung Nasution:<sup>22</sup>

“... kemiskinan yang dimaksud disini, bukanlah kemiskinan yang dialami oleh seseorang individu oleh karena dia terus-menerus sakit. Kemiskinan yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 193.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 195.



demikian ini adalah bersifat individual, bukan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Golongan demikian itu misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan dirinya sendiri dan keluarganya”.

Agama Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia sangat berpengaruh dalam memberi perlakuan terhadap fakir miskin. Dalam doktrin agama-agama yang ada mengajarkan keutamaan perlakuan santun bagi fakir miskin. Bagi orang yang lebih mampu seharusnya dapat memberikan sedekah (*carity*) yang merupakan anjuran dan dapat pula berupa zakat (*obligation*) yang merupakan kewajiban bagi orang yang lebih mampu.<sup>23</sup>

Sikap melayani dan melindungi kepada masyarakat miskin senafas dengan ketentuan dalam UUD 1945. Hal itu karena konstitusi Negara Indonesia tersebut memang lahir dari nilai-nilai yang agamis yang sudah terlembaga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada pasal 34 UUD 1945 diatur mengenai fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung-jawab negara.

---

<sup>23</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Gramedia, 2011, hal. 53.

Terkait dengan persoalan bantuan hukum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bantuan terhadap fakir miskin menjadi kewajiban negara pula. Dengan demikian pemberian bantuan hukum yang berkaitan dengan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam peraturan nasional dijamin dalam UUD 1945.

Persoalan bantuan hukum juga banyak diatur dalam berbagai instrumen peraturan internasional seperti diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Sementara instrumen internasional lain mengenai pemberian bantuan hukum dapat ditemukan juga dalam dokumen *World Conference on The Independence of Justice*. Selain itu, bantuan hukum diatur dalam *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada bagian B. *Other Instrument Adopted by the Congress* tepatnya pada bagian 3. *Basic Principles of Lawyers* tentang *Access to Lawyers and Legal services*.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan hak didampingi advokat atau penasihat hukum telah diatur dalam *United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Of-*

---

<sup>24</sup> Ketentuan mengenai *Access to Lawyers and Legal Services* dapat dilihat pada poin 3 dan 4: (3) "Government shall ensure the provision of sufficient funding and other Resources for legal service necessary to other disadvantaged person. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources", (4) "Government and professional association of lawyers shall promote programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special as to enable them to assert rights and where necessary call upon the assistance of lawyers." Ibid., hal. 54.



fenders:

1. "All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings";
2. "Government shall ensure that efficient procedures and responsive mechanism for effective and equal access to lawyer are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic, colour origin, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin property, birth, economic or other status."<sup>25</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak didampingi advokat atau penasihat hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang menyatakan:

*"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."*

---

<sup>25</sup> Ketentuan mengenai hak didampingi advokat atau penasihat hukum khususnya terdapat pada bagian B tentang: *Other Instruments Adopted by the congress* tepatnya pada bagian 3. *Basic Principles on The Role of Lawyers* tentang, *Access to Lawyer and Legal Services*. United Nations, *Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, Op. Cit, hal. 120.



Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya mempunyai masalah dalam penegakan hukum pidana (*law enforcement*), dan sistem hukum c.q. sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia tidak berfungsi dalam arti kata yang seluasnya. Polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakatan belum bisa bekerja sama secara terpadu (*integrated criminal justice system*) untuk suatu tujuan bersama, yaitu pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*). Ini karena masing-masing subsistem (institusi) masih bekerja terkotak-kotak dan belum terpadu.

Selain itu, sub sistem polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakatan harus diperhatikan fungsi dari profesionalismenya agar dapat menunjang sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sebagai bagian dari sistem peradilan. Juga, profesi advokat (penasihat hukum) dan masyarakat merupakan faktor penunjang yang cukup vital dalam menunjang keberhasilan mencapai sistem peradilan pidana. Kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan pidana ini penting supaya bisa mencapai tujuan tersebut.

Peran serta masyarakat akan berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam meraih tujuan. Misalnya, laporan tentang suatu kejahatan atau tindak pidana yang banyak diperoleh masyarakat yang secara sukarela melapor kepada polisi.

Bantuan hukum (*legal aid*) sebagai bagian dari profesi advokat (penasihat hukum) yang dikenal sebagai *pro bono publico*, atau dalam istilah sistem hukum Belanda

sebagai *pro deo*, merupakan unsur penting dalam meredakan ketegangan yang ada dalam masyarakat. Ketegangan yang merebak karena perbedaan kaya dan miskin ini merupakan akibat dari paradigma pembangunan yang tidak adil, khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>26</sup>

Kerapkali masyarakat miskin diperlakukan secara tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari penasihat hukum. Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan, dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Kasus yang terjadi dengan Nenek Minah (65) tak pernah menyangka perbuatannya memetik 3 buah kakao,<sup>27</sup> AAL yang dituduh mencuri sandal,<sup>28</sup> menunjukkan ironi keadilan terutama bagi rakyat yang miskin.

---

<sup>26</sup> Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hal. 56.

<sup>27</sup> Nenek Minah (65) tak pernah menyangka perbuatannya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia dikenakan 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Data diadaptasi dari <http://www.detiknews.com> diunduh pada hari Sabtu, 21 Januari 2012.

<sup>28</sup> Hal tersebut terkait dengan vonis hakim Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah yang menyatakan AAL (15) bersalah mencuri sandal milik Briptu Ahmad Rusdi, yang dijatuhkan pada Rabu 4 Januari 2012 malam. Kejadian tersebut menjadikan Indonesia memiliki simbol ketidak-adilan baru yang disimbolkan dengan ironi sandal jepit. Begitulah berita-berita dari media asing. Aksi pengumpulan sandal jepit, baru atau lawas menjadi berita yang mendunia. Aneka judul menghiasi media massa asing, mulai media Singapura hingga AS. Ada yang memberi judul "*Indonesians Protest With Flip-Flops*",



Sementara masyarakat yang mampu mengakses ekonomi dan politiknya dapat mendapatkan jasa hukum dan pembelaan dari advokat penasihat hukum yang profesional. Untuk mengatasi problem tersebut, maka bantuan hukum merupakan konsep untuk mewujudkan kesederajatan di hadapan hukum. Di samping itu bantuan hukum juga mewujudkan pemberian jasa hukum dan pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.

Profesi advokat adalah profesi yang berkaitan erat dengan bantuan hukum sangat relevan dengan semangat untuk melakukan pembelaan hukum, terutama bagi orang miskin. Karena itu, profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/ miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Keharusan membela fakir miskin dalam profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* membuat profesi hukum yang satu ini populer di masyarakat Internasional, tetapi tidak demikian halnya di Indonesia.

Kewajiban bagi profesi advokat untuk membela orang miskin tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat untuk semua orang tanpa kecuali. Menurut Mardjono Reksodiputro, profesi hukum hanya dapat ditujukan

---

*"Indonesians have new symbol for injustice: sandals", "Indonesia's Flip-Flop Revolution", "Indonesians dump flip-flops at police station in symbol of frustration over uneven justice", maupun "Indonesians fight injustice with sandals". Data diambil dari <http://www.detik-news.com> diunduh pada hari Sabtu, 21 Januari 2012.*



kepada para lulusan pendidikan tinggi (fakultas) hukum yang menjalankan profesi dalam masyarakat. Mereka adalah sarjana-sarjana hukum yang dianggap menjalankan keahliannya dengan standar tinggi, seperti advokat atau lebih luas penasihat hukum (konsultan hukum) ataupun jaksa dan hakim. Tidak termasuk di dalamnya sarjana hukum yang menjadi dosen ataupun polisi.<sup>29</sup>

Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*). Seringkali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan *due process model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Padahal, menurut asas legalitas, seseorang dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum oleh pengadilan yang bebas dan imparsial, jujur dan terbuka.

## **E. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

### **1. Latar-belakang POSBAKUM**

Dalam Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama ditekankan beberapa prinsip dalam pemberlakuan POSBAKUM di lingkungan Peradilan Agama, antara lain:

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hal. 78.

*Policy* (kebijakan) negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan



ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU Nomor 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU Nomor 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU Nomor 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin



dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.<sup>30</sup>

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
- f. HIR (Hezien Inlandsch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227);
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>30</sup> Keputusan Tuada Uldilag MA RI dan Keputusan Sekretaris MA RI tentang *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SEMA 10/2010* berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Agama.

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- n. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009.

Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung, Drs. H. Hariri YS.SH.MH. yakin Peradilan Agama akan mampu mencapai target yang dibebankan negara untuk membantu masyarakat pencari keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Dalam rentang waktu 10 bulan, mulai Maret hingga Desember 2011, Peradilan Agama diberi target 11.553 perkara dengan total biaya Rp 4.182.500.000. Menurut Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung, lembaga Peradilan Agama mampu mencapai target itu. Sebagaimana diketahui, POSBAKUM di Peradilan Agama akan dioperasikan mulai Maret 2011. Untuk saat ini, belum seluruh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki POSBAKUM. MA baru menetapkan 46 dari 343 PA sebagai *project pilot*.<sup>31</sup>



Agar POSBAKUM dapat beroperasi dengan baik, Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung menyarankan agar pihak PA bekerjasama dengan organisasi advokat tertentu yang mewajibkan calon advokat untuk magang dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain organisasi advokat, pihak lain yang memungkinkan diajak kerja sama ialah Perguruan Tinggi dan LSM yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sesuai SEMA 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pemberi jasa bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama harus Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.<sup>32</sup>

Dalam kaitan ini kerjasama antara Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang untuk menyelenggarakan POSBAKUM, merupakan komitmen untuk mewujudkan agar bantuan hukum di lembaga Pengadilan Agama dapat berjalan dengan baik. Adapun beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang untuk menjalin kerjasama dengan LPKBHI adalah:

- LPKBHI dipandang sebagai organisasi bantuan hukum yang memiliki tenaga-tenaga advokat yang berkompeten.
- LPKBHI merupakan lembaga bantuan hukum yang berbasis pada perguruan tinggi. Dengan demikian, kerjasama dalam pelaksanaan POSBAKUM dapat

---

<sup>31</sup> [www.padumai.net](http://www.padumai.net), Jum'at, 16 Desember 2011.

<sup>32</sup> *Ibid.*



memiliki dimensi akademis, karena tidak dapat terelakkan dilakukannya pengkajian-pengkajian secara ilmiah dan evaluatif oleh LPKBHI.

## 2. Tujuan POSBAKUM

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SEMA 10/2010 telah diterbitkan pada 21 Februari 2011. Juklak itu berisi Keputusan Tuada Uldilag MA RI dan Keputusan Sekretaris MA RI. Isinya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknis yustisial maupun non-teknis yustisial.

SEMA 10/2010 mengatur hal-hal yang mendasar dan tidak memberikan penjelasan tentang teknis pelaksanaannya. Dengan adanya juklak tersebut, Pengadilan Agama akan lebih mudah melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, karena di dalam Juklak ini sudah diatur tentang tatacara kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, bahkan format MoU dalam kerjasama tersebut juga sudah disiapkan contohnya. Juklak tersebut juga mengatur tentang proses berperkara secara prodeo dan sidang keliling secara rinci.<sup>33</sup>

Adapun tujuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bertujuan untuk:<sup>34</sup>

- a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Keputusan Tuada Uldilag MA RI dan Keputusan Sekretaris MA RI tentang *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SEMA 10/2010* berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Agama.

- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Menurut Dirjen Badilag Wahyu Widiananda program POSBAKUM merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan.<sup>35</sup> Berdasarkan tujuan yang dimaksud, menunjukkan bahwa POSBAKUM merupakan program yang memiliki tujuan yang sangat mulia. Penyelenggaraan program POSBAKUM juga menegaskan prinsip perlunya penegakan hukum yang berorientasi pada pemberian keadilan hukum untuk semua pihak atau *justice for all*.

Tujuan untuk menegakkan prinsip *justice for all*, relevan dengan realitas bahwa mayoritas *stakeholder-stakeholder* lembaga Peradilan Agama adalah masyarakat dalam stratifikasi sosial yang berpendidikan rendah. Pada masyarakat ini terdapat dua kelemahan kapasitas dan ekonomi. Dari segi kapasitas, mereka memiliki kemampuan yang minim atau tidak mengerti proses beracara di pengadilan. Sedang secara ekonomi, mereka juga tidak mampu membayar jasa pengacara yang dapat membantunya dalam mencari keadilan di lembaga pengadilan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, adanya pelayanan POSBAKUM dapat menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh pelayanan pengadilan. Mempertegas hal ini, Direktur LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo menyatakan bahwa pelaksanaan program POSBAKUM merupakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat kecil dalam bidang hukum, yang sama pentingnya dengan JPS-JPS lain yang mensubsidi masyarakat untuk memperingan beban hidup mereka.<sup>36</sup>

Selain dengan POSBAKUM, masyarakat yang kurang mampu juga dapat beracara secara cuma-cuma melalui prodeo dengan syarat-syarat yang diperingan, misalnya hanya dengan melampirkan SKTM atau lainnya.

Dengan adanya POSBAKUM diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pengadilan.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Drs. H. Musahadi, M.Ag. Direktur Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada hari Senin, 12 Desember 2011.





### **BAB III**

## **LEMBAGA PELAKSANA LAYANAN POSBAKUM**

Lembaga yang diberi amanat untuk melaksanakan layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Semarang adalah Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, sedangkan yang diberi amanat untuk melaksanakan layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Brebes adalah Lembaga bantuan Hukum (LBH) Brebes. Kedua lembaga ini akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI)**

##### **1. Sejarah Berdiri**

Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) berdiri pada tanggal 2 September 1999. Lembaga ini didirikan oleh Fakultas Syari'ah dan Pengurus Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sebagai salah satu bentuk Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sejak awal berdirinya, LPKBHI berusaha untuk membenahi manajemen lembaga dan menapaki jatidirinya dengan meningkatkan SDM yang dimilikinya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dengan langkah-langkah strategis inilah pada akhirnya LPKBHI dikenal oleh masyarakat. Meski demikian, usaha ini juga menemui berbagai hambatan dan rintangan yang cukup berat. Konsolidasi dan koordinasi selalu dilakukan hingga LPKBHI menjadi sebuah lembaga yang cukup eksis dan menjadi kebanggaan Fakultas Syariah. Bahkan menjadi ujung tombak dan garda depan dalam membidani lahirnya APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia), yang personil Dewan Pengurus Pusat-nya juga para fungsionaris LPKBHI.

Kelahiran APSI yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat, merepresentasikan kedudukan yang sederajat antara sarjana syari'ah dengan sarjana hukum umum dalam memperoleh kesempatan menjadi pengacara. Dengan demikian eksistensi LPKBHI secara tidak langsung juga telah memberikan kontribusi yang signifikan secara nasional bagi kelangsungan institusi Fakultas Syari'ah maupun para *out putnya*.

## **2. Struktur Pengurus LPKBHI**

### **DEWAN PENASEHAT**

1. Rektor IAIN Walisongo
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN WALISONGO
3. Ketua Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo



**DIREKTUR**

Drs. H. Musahadi, M.Ag.

**WAKIL DIREKTUR**

Drs. H. Maksun M.Ag.

**SEKRETARIS**

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

**WAKIL SEKERTARIS**

Iman Fadhillah, S.HI.

**BENDAHARA**

Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum.

**DIVISI PENYULUHAN DAN KONSULTASI**

1. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
2. Drs. H. Eman Sulaeman M.H.
3. Drs. Taufik, M.Hum.
4. Akhmad Arif Junaidi M.Ag.
5. H. Muhammad Saefullah, M.Ag.

**DIVISI BANTUAN HUKUM**

1. Dra. Hj. Siti Mujibatun M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
3. Drs. Saekhu, M.Hum.
4. Ahmad Syifaul Anam, S.HI. MH.

**DIVISI DIKLAT DAN LITBANG**

1. Drs. Sahidin, M.Si.
2. Drs. H. Khoirul Anwar, M.Ag.
3. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
4. Novita Dewi Mas̄yitoh, S.H., M.H

**STAF AHLI**

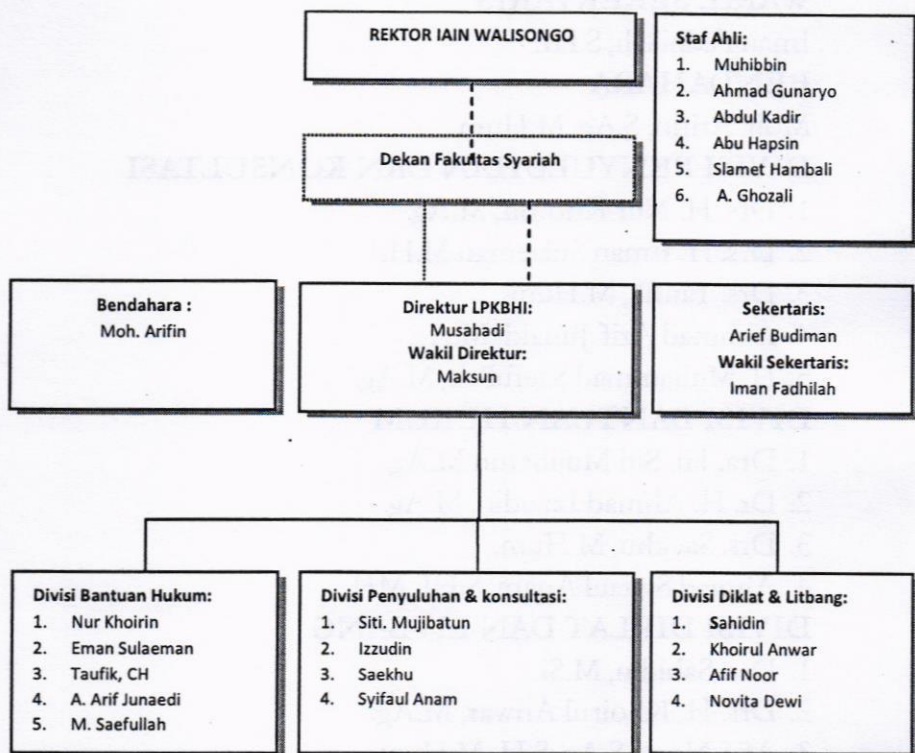
1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc.
3. Drs. H. Abdul Kadir, SH.

4. Drs. H. Abu Hafsin, MA.,Ph.D.

5. Drs. H. Slamet Hambali, M.SI.

6. Drs. H. Ahmad Ghozali, MSI.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN LPKBHI  
PERIODE 2010-2012  
REKTOR IAIN WALISONGO**



3. Kiprah LPKBHI

Dalam usianya yang menapaki tahun ke-12, LPKBHI telah banyak berkiprah dalam pembangunan di bidang hukum, baik melalui penyuluhan, konsultasi maupun pemberian bantuan hukum. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LPKBHI antara lain:

- a. Membuka Rubrik Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam. Rubrik ini merupakan bentuk kerjasama antara LPKBHI dengan Radar Semarang Jawa Pos. Kegiatan ini berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pembaca baik melalui surat maupun via telepon. Rubrik konsultasi ini terbit setiap hari jum'at pada halaman 4 Radar Semarang Jawa pos ini.

Hanya saja sejak bulan Agustus tahun 2005 rubrik Konsultasi Hukum ini mengalami hambatan penerbitan, yang disebabkan adanya perubahan kebijakan setelah adanya pergantian Pimpinan Redaksi Radar Semarang.

- b. Konsultasi Hukum

Kegiatan konsultasi hukum ini dilakukan dengan cara menerima klien yang datang, serta memberikan jawaban-jawaban dan solusi atas problem yang dihadapi oleh klien. Diantara klien LPKBHI juga mengajukan konsultasi hukum adalah warga Inggris yang ingin pindah dan memeluk agama Islam. Kegiatan ini bersifat rutin dan dilaksanakan pada jam kantor.



c. Penyuluhan Hukum

Salah satu usaha peningkatan kesadaran hukum dilakukan dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses sosialisasi materi perundang-undangan yang berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989, KHI, UU Nomor 18 Tahun 2003, dan UU Nomor 41 Tahun 2004.

d. Bantuan Hukum

Yang dimaksud bantuan hukum disini adalah pemberian bantuan kepada klien dalam sidang-sidang di pengadilan.

e. Dialog Hukum Islam di Radio

Kegiatan dialog ini bersifat rutin dan dilaksanakan setiap satu bulan sekali di RRI Semarang. Dalam satu tahun terjadwal 10 kali (2006). Pemateri yang sudah mengisi adalah Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag (Perkawinan). dan Moh Arifin, S.Ag M.Hum (Nikah Hamil).

f. Pembentukan Ikatan Hakim PA Alumni Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara LPKBHI dengan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dan dilaksanakan pada bulan Januari 2005 dengan ketua terpilih Drs. H. Zaenal Hakim, SH sebagai ketua. Acara ini diikuti oleh para hakim PA Jawa Tengah alumni Fakultas Syari'ah, dan dosen. Sebagai narasumber pada acara tersebut adalah:

1. Prof. Dr. A. Qodri A. Azizy, MA
  2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
  3. Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
  4. Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
- g. Penerbitan Buku
- Penerbitan buku merupakan upaya sosialisasi LPKBHI dan bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat. Buku yang berjudul "*Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*" merupakan kumpulan hasil Rubrik Konsultasi dan Penyuluhan Hukum Islam di Radar Semarang Jawa Pos. Buku ini dicetak sebanyak 1.000 eksemplar dan telah didistribusikan kepada sebagian hakim-hakim PA di Jawa Tengah, pengurus LPKBHI, perpustakaan, para dosen dan mahasiswa.
- h. Pelatihan Kuasa Hukum
- Pelatihan kuasa hukum ini dimaksudkan untuk memberikan bekal tentang kepengacaraan kepada mahasiswa, khususnya Fakultas Syari'ah. Kegiatan pelatihan kuasa hukum ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun bekerjasama dengan HMJ AS dan diikuti oleh mahasiswa jurusan AS Fakultas Syariah.
- i. Mengadakan Itsbat Nikah Massal
- Menurut data PA Semarang, di Kecamatan Mijen pasangan suami isteri yang tidak mempunyai akta nikah mencapai jumlah terbesar di Kota Semarang. Hal inilah yang mendorong LPKBHI mengadakan *itsbat nikah*. Kegiatan ini bekerjasama dengan PTA Jawa Tengah, PA, Depag Kota Semarang, Kecamatan dan KUA Kecamatan Mijen.



Kegiatan sudah berhasil melakukan pendataan jumlah pasangan yang akan *itsbat nikah*. Namun, pelaksanaan *itsbat nikah* tersebut tertunda karena bersamaan dengan Pilkada. Dan proyek *itsbat nikah* tersebut sekarang tengah dikerjakan kembali bekerjasama dengan tim KKN UNDIP dan diharapkan pada bulan Maret 2006 persidangan *itsbat nikah* massal dapat dilaksanakan.

- j. Bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, setiap semester LPKBHI menjadi tempat KKL dan PPL mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah. Materi yang diajarkan meliputi; keadvokatan, kemahiran litigasi dan non litigasi.

- k. Sebagai narasumber dalam perumusan program advokasi hukum di wilayah Jawa Tengah.

Di forum kajian anggaran Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Bapeda, LPKBHI dalam kegiatan ini ditunjuk oleh Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai satu-satunya LBH yang mewakili sekian banyak LBH yang ada di Jawa Tengah.

Bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Direktur LPKBHI Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

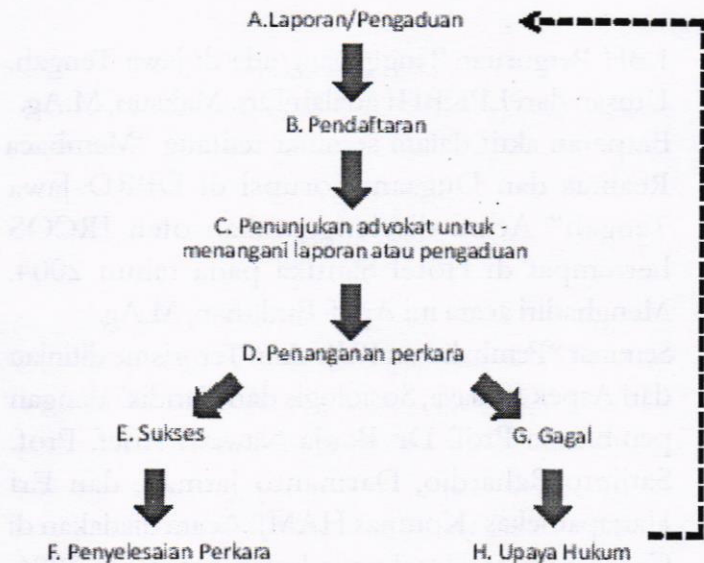
- l. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan "Perumusan Usaha-Usaha Penegakan Hukum di Jawa Tengah" yang diselenggarakan oleh Biro Hukum pemerintah Jawa Tengah di Ungaran pada tanggal 20-22 Desember 2005. Pesertanya adalah instansi-instansi penegak hukum di Jawa Tengah, dan LPKBHI tercatat sebagai salah satu dari 2 LBH yang mewakili



- LBH Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Tengah. Utusan dari LPKBHI adalah Drs. Maksun, M.Ag.
- m. Berperan aktif dalam seminar tentang “Membaca Realitas dan Dugaan Korupsi di DPRD Jawa Tengah” Acara diselenggarakan oleh IRCOS bertempat di Hotel Santika pada tahun 2004. Menghadiri acara ini Arief Budiman, M.Ag.
  - n. Seminar “Pembahasan RUU Anti Terorisme ditinjau dari Aspek Budaya, Sosiologis dan Yuridis” dengan pembicara: Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Prof. Satjipto Rahardjo, Darmanto Jatman, dan Eri Harjapamekas (Komnas HAM). Acara diadakan di Graha Santika Hotel pada bulan desember 2004. Menghadiri acara ini Moh Arifin, S.Ag. M.Hum.

#### **4. SOP Penanganan Perkara LPKBHI**

- a. Penetapan SOP penanganan perkara di LPKBHI diharapkan dapat memfungsikan peran organisasi sebagai pusat kegiatan. Di samping itu dengan SOP diharapkan terdapat standarisasi yang sama dalam setiap penanganan perkara, yang meliputi pelayanan, hak, maupun kewajiban baik klien maupun lembaga.
- b. Penanganan perkara oleh LPKBHI dilakukan melalui mekanisme organisasi di bawah ini:



**Keterangan:**

- Adanya laporan/pengaduan perkara dari klien
- Pendaftaran: semua laporan atau pengaduan perkara yang masuk LPKBHI didaftarkan terlebih dahulu di sekretariat LPKBHI
- Penunjukan advokat untuk menangani laporan atau pengaduan dilakukan oleh ketua pimpinan LPKBHI
- Penanganan perkara: bagi advokat yang telah ditunjuk oleh lembaga diharap dapat mendampingi/mewakili klien dalam penanganan perkara
- Sukses: Jika perkara sukses maka tahap selanjutnya adalah penyelesaian perkara
- Penyelesaian perkara: berarti perkara telah selesai untuk ditangani

- g. Gagal: Jika perkara gagal maka langkah selanjutnya adalah upaya hukum
- h. Upaya Hukum: upaya hukum dilakukan dengan cara melaporkan kembali perkara tersebut di sekretariat.

## **5. Pedoman Umum (AD) LPKBHI**

### **PEDOMAN UMUM LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO SEMARANG**

#### **Mukadimah**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan salah satu institusi penting dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Karenanya, kehadiran LBH di tengah-tengah masyarakat menjadi sangat relevan dan menempati posisi yang sangat strategis, di samping institusi-institusi sejenis yang tergabung dalam catur wangsa penegak hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, memiliki tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang membentuk sebuah lembaga bantuan hukum yang diberi nama Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI).



## **BAB I**

### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PENDIRI**

#### **Pasal 1**

Badan ini bernama Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, disingkat LPKBHI.

#### **Pasal 2**

Lembaga ini berkedudukan hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sebagai lembaga non organik.

#### **Pasal 3**

Lembaga ini didirikan oleh Fakultas Syari'ah dan pengurus Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

## **BAB II**

### **DASAR HUKUM**

#### **Pasal 4**

Lembaga ini berdasarkan pada:

1. Prinsip-prinsip ajaran Islam;
2. Pancasila dan UUD 1945
3. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat
4. Kode Etik Advokat Indonesia;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat;
6. Surat Keputusan rektor IAIN Walisongo No. IN/12/R/HK.04/0413/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pengurus LPKBHI IAIN Walisongo Semarang;

7. Perjanjian Kerjasama (MoU) Rektor IAIN Walisongo Semarang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tanggal 2 September 1999 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bantuan Hukum.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN FUNGSI**

##### **Pasal 5**

Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

##### **Pasal 6**

Lembaga ini berfungsi sebagai:

1. Wadah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, khususnya hukum Islam;
2. Wadah praktikum bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

### **BAB IV**

#### **STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 7**

LPKBHI dikelola oleh pengurus yang disahkan oleh Rektor IAIN Walisongo Semarang.

##### **Pasal 8**

Susunan pengurus terdiri dari :

1. Dewan Penasehat
2. Direktur
3. Wakil Direktur
4. Sekretaris

5. Wakil Sekretaris
6. Bendahara
7. Divisi Bantuan Hukum
8. Divisi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum
9. Divisi Diklat dan Litbang
10. Staf Ahli

## **BAB V**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

Kuangan Lembaga ini diperoleh dari :

1. IAIN Walisongo Semarang
2. APBD Jawa Tengah
3. Sumber-sumber lain yang halal

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

1. Pedoman Umum ini berlaku sejak ditetapkan;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional;
3. Perubahan terhadap Pedoman Umum ini hanya bisa dilakukan oleh rapat pengurus yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga dari pengurus.

#### **B. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes**

##### **1. Sejarah Berdiri**

Lembaga bantuan Hukum (LBH) Brebes berdiri pada tahun 1999. Bermula dari diskusi-diskusi yang berlangsung dalam wadah BLC (*Brebes Lanyer Club*), maka muncul gagasan untuk mendirikan lembaga yang



memiliki *concern* dalam membantu para pencari keadilan yang kurang mampu. Dengan visi membantu para pencari keadilan kurang mampu inilah maka Lembaga Bantuan Hukum didirikan melalui akte yayasan yang terdaftar pada Departemen Hukum dan perundang-undangan.

Meskipun berdasarkan visi lembaga LBH Brebes adalah memberi layanan bantuan hukum pada para pencari keadilan yang tidak mampu, bukan berarti LBH Brebes tidak bersedia memberi layanan pada mereka yang mampu. Para pencari keadilan yang memiliki kemampuan secara ekonomis juga terlayani oleh mereka dengan menerapkan model subsidi silang, yakni mereka yang mampu membayar jasa layanan bantuan hukum yang kemudian bisa mensubsidi biaya layanan jasa bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

Semula lembaga ini memiliki 23 aktifis berlatar belakang pendidikan hukum dari berbagai Perguruan Tinggi, namun sekarang ini tinggal 13 orang yang aktif menjalankan roda lembaga dan melakukan fungsi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes cukup simpel, yakni terdiri dari Dewan Pembina yang diketuai oleh H. Suwardi Wiraatmaja, SH., sesepuh Brebes, dan Dewan Pengawas yang diketuai oleh Fakhruddin Abdul Kafi, SH. Struktur berikutnya adalah Pengurus Harian yang terdiri dari

Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang. Adapun struktur lengkapnya adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina : H. Suwardi Wiraatmaja, SH  
(Ketua)

Dewan Pengawas : Fakhruddin Abdul Kafi, SH.

**PENGURUS HARIAN :**

Ketua : Hascaryo Wimbo, SH.

Wakil Ketua : Edi Satrio, SH.

Sekretaris : Slamet Sutanto, SH.

Bendahara : Nur Eli Eliah, SH.

Bidang Perdata : Edi Satrio, SH.

Bidang Pidana : Sholeh, SH.

Bidang PTUN : Hascaryo Wimbo, SH.

Meskipun bernama LBH (Lembaga Bantuan Hukum), LBH Brebes tidak memiliki hubungan organisatoris dengan LBH-LBH lainnya di bawah Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, meskipun secara fungsional, lembaga ini memiliki *concern* yang sama dengan YLBHI dan LBH-LBH lainnya<sup>1</sup>, yakni dalam hal turut membantu para pencari keadilan yang kurang

---

<sup>1</sup> YLBHI semula adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 yang kemudian mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Ketua Dewan Pembinaanya sejak 25 April 2007 adalah Toeti Heraty



mampu supaya mereka memiliki akses dan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Gagasan pendirian lembaga ini sebagaimana dituturkan oleh Hascaryo Wimbo<sup>2</sup> untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka.

LBH ini berorientasi menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang terjadi di Brebes dan sekitarnya. LBH Brebes juga memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

---

Roosseno yang terpilih mengganti Adnan Buyung Nasution. Pada akhir masa baktinya, Toeti digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis dan secara definitif pada akhir 2011 dijabat oleh Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung yang kemudian dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI. LBH sekarang ini berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua. Data diadaptasi dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan\\_Lembaga\\_Bantuan\\_Hukum\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Bantuan_Hukum_Indonesia) diakses tanggal 24 Januari 2011.

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 25 Januari 2012.



### **3. Kiprah Lembaga**

Selama lebih dari 11 tahun berdirinya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes telah menunjukkan banyak kiprahnya. Meskipun tidak terkenal seperti LBH-LBH di daerah lain, tetapi LBH Brebes telah terlibat dalam banyak penanganan perkara yang melibatkan berbagai kalangan, seperti tokoh publik, pencari keadilan yang tidak mampu, pemberian bantuan hukum bagi para Kades dan Sekdes yang tersangkut kasus hukum, serta kasus-kasus lainnya yang sangat beragam.

Selain membrikan bantuan hukum, LBH Brebes juga membuka layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat luas, terutama yang terkait dengan hukum keluarga, NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) serta masalah-masalah kewarisan.

LBH Brebes juga aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes, menyangkut NTCR, perlindungan anak, penyuluhan hukum mengenai KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Penyuluhan hukum lainnya adalah mengenai Ranham (Rencana Aksi Hak Asasi manusia) dan penyuluhan hukum terkait dengan cukai rokok. LBH Brebes juga pernah terlibat dalam memfasilitasi Pendidikan Advokasi dalam kerangka program PNPM di Brebes.

Hascaryo Wimbo, Ketua Harian LBH Brebes menuturkan bahwa salah satu tantangan lembaganya terkait dengan lembaga perkawinan adalah makin banyaknya kasus perceraian yang melibatkan keluarga

TKI. Sekarang ini di Brebes sedang terjadi *trend*, wanita yang pulang kerja dari luar negeri menjadi TKW kemudian mengajukan gugatan cerai. Hal ini barangkali disebabkan posisi tawar mereka secara ekonomi dan sosial menjadi lebih tinggi dari posisi tawar suami. Ada kesan semakin mudarnya lembaga perkawinan di wilayah tersebut.

Selain perceraian yang terkait dengan TKI, pola perceraian di Brebes juga bisa dilihat melalui musim. Pada musim paceklik, baik paceklik tani maupun paceklik nelayan statistik perceraian hampir dapat dipastikan meningkat. Paceklik nelayan terjadi pada musim *rendheng* (musim hujan angin) sehingga mereka tidak berani melaut atau walaupun berani melaut tangkapan mereka sangat berkurang karena ombak laut yang besar. Sedangkan paceklik tani terjadi setelah musim tanam usai.

Menghadapi ini, LBH Brebes menggulirkan gagasan untuk mengorganisasi program-program penguatan lembaga perkawinan agar masyarakat tidak dengan mudah melakukan kawin cerai atau mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.





## **BAB IV**

# **PROFIL PELAKSANAAN JASA LAYANAN POSBAKUM**

### **A. Profil SDM Pelaksana Jasa Layanan POSBAKUM**

Di Jawa Tengah terdapat 36 Kota/Kabupaten. Secara yuridis di setiap Kota/Kabupaten terdapat satu lembaga Peradilan Agama. POSBAKUM di Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada tahun 2011 baru ada di 4 tempat, yaitu Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Brebes, Purwodadi, dan Wonosobo. Pengadilan tersebut mendapat DIPA tahun 2011 untuk pelaksanaan POSBAKUM bagi masyarakat yang tidak mampu.

#### **1. Pengadilan Agama Semarang**

Pengadilan Agama Semarang berada di Jl. Ronggolawe Nomor 6 Semarang Telp (024)7606741, Fax (024)7622887. Untuk melengkapi pelayanan kepada masyarakat, PA Semarang menyediakan email dan website, yaitu Email: *pasemarang@yahoo.co.id* Website: *www.pasemarang.net*.

PA Semarang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- c. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelandutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
- f. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menyimak sejarah PA Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made

Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang. Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.



Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilan sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama. Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumi Putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan Teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Pendapat di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari



syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang memperkenalkan Teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah SWT masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

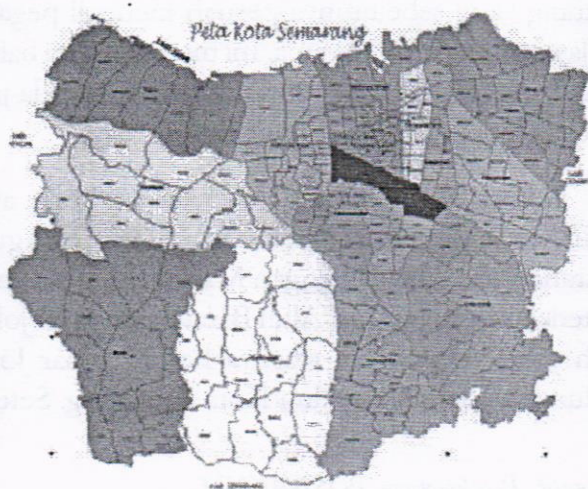


Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basyiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad Tahun 1882.

*Kantor Pengadilan Agama Semarang pada awal berdirinya berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah*

beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas  $499 \text{ M}^2$  diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

*Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang terlihat dalam peta kota Semarang sebagai berikut:*



*Berdasar peta Kota Semarang di atas, menunjukkan bahwa yuridiksi Pengadilan Agama Semarang sama dengan wilayah Kota Semarang, terdiri 16 kecamatan dan masing-masing kecamatan memiliki beberapa kelurahan, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:*

1) Kecamatan Semarang Barat, terdiri dari 16

Kelurahan:

- Ngemplak Simongan
- Manyaran
- Krapyak
- Tambakharjo
- Kalibanteng Kulon
- Kalibanteng Kidul
- Gisikdrono
- Bongsari
- Bojongsalaman
- Cabean
- Salaman Mloyo
- Karangayu
- Krobokan
- Tawangsari
- Tawangmas
- Kembangarum

2) Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari 9

Kelurahan:

- Bandarharjo
- Bulu Lor
- Lombokan
- Purwosari
- Kuningan



## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

- Panggung Lor
  - Panggung Kidul
  - Tanjungmas
  - Dadapsari
- 3) Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 15 Kelurahan:
- Miroto
  - Brumbungan
  - Jagalan
  - Kranggan
  - Gabahan
  - Kembangsari
  - Sekayu
  - Pandansari
  - Bangunharjo
  - Kauman
  - Purwodinatan
  - Karang Kidul
  - Pekunden
  - Pindrikan Kidul
  - Pindrikan Lor
- 4) Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 10 Kelurahan:
- Bulustalan
  - Barusari
  - Randusari
  - Mugasari
  - Pleburan
  - Wonodri
  - Peterongan
  - Lamper Kidul

- Lamper Lor
  - Lamper Tengah
- 5) Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 Kelurahan:
- Rejomulyo
  - Kemijen
  - Mlatibaru
  - Mlatiharjo
  - Bugangan
  - Sarirejo
  - Kebonagung
  - Rejosari
  - Karangturi
  - Karangtempel
- 6) Kecamatan Pedurungan, terdiri dari 12 Kelurahan:
- Penggaron Kidul
  - Tlogosari Wetan
  - Gemah
  - Tlogomulyo
  - Pedurungan Kidul
  - Kalicari
  - Muktiharjo Kidul
  - Palebon
  - Pedurungan Lor
  - Plamongansari
  - Tlogosari Kulon
  - Pedurungan Tengah
- 7) Kecamatan Gajahmungkur, terdiri dari 8 Kelurahan:
- Sampangan

## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

- Bendan Ngisor
  - Bendan Duwur
  - Karangrejo
  - Gajahmungkur
  - Lampongsari
  - Bendungan
  - Petompon
- 8) Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 Kelurahan:
- Pidakpayung
  - Gedawang
  - Jabungan
  - Pedalangan
  - Banyumanik
  - Srandol Kulon
  - Srandol Wetan
  - Tinjomoyo
  - Padangsari
  - Sumurboto
  - Ngesrep
- 9) Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 Kelurahan:
- Sembungharjo
  - Kudu
  - Karangroto
  - Trimulyo
  - Bangetayu Wetan
  - Terboyo Kulon
  - Terboyo Wetan
  - Genuksari
  - Banjardowo
  - Gebangsari



- Penggaron Lor
  - Muktiharjo Lor
  - Bangetayu Kulon
- 10) Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 Kelurahan:
- Cangkiran
  - Bubakan
  - Karangmalang
  - Polaman
  - Purwosari
  - Tambangan
  - Wonolopo
  - Mijen
  - Jatibarang
  - Jatisari
  - Wonoplumbon
  - Pesantren
  - Ngadirgo
  - Kedung Pane
- 11) Kecamatan Gunungpati, terdiri dari 16 Kelurahan:
- Gunungpati
  - Plalangan
  - Nongkosawit
  - Mangunsari
  - Pakintelan
  - Ngijo
  - Kandri
  - Cepoko
  - Jatirejo
  - Pongangan
  - Sekaran

## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

- Kalisegoro
  - Patemon
  - Sukorejo
  - Sadeng
  - Sumur Rejo
- 12) Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari 10 Kelurahan:
- Gondoriyo
  - Podorejo
  - Beringin
  - Purwoyoso
  - Kalipancur
  - Bambangkerep
  - Ngaliyan
  - Tambakaji
  - Wonosari
  - Wates
- 13) Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 Kelurahan:
- Jraakah
  - Tugurejo
  - Karanganyar
  - Randugarut
  - Mangkang Wetan
  - Mangkang Kulon
  - Mangunharjo
- 14) Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 Kelurahan:
- Tambakrejo
  - Kaligawe
  - Sawah Besar
  - Siwalan
  - Sambirejo
  - Pandean Lamper

- Gayamsari
- 15) Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 Kelurahan:
  - Jatingaleh
  - Karanganyar Gunung
  - Jomblang
  - Candi
  - Tegalsari
  - Wonotinggal
  - Kaliwiru
- 16) Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 Kelurahan:

- Tembalang
- Bulusan
- Kramas
- Rowosari
- Metesehi
- Mangunharjo
- Sambiroto
- Kedungmundu
- Sendangguwo
- Sendangmulyo
- Tandang
- Jangli

Berdasar hal di atas Pengadilan Agama kelas IA Kota Semarang mempunyai yuridiksi hukum di 16 kecamatan dan 174 kelurahan.

Pada tahun 2011 PA Semarang mendapat DIPA tahun 2011 untuk pekerjaan jasa pelayanan Bantuan Hukum atau Pos Bantuan Hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar



## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

jasa advokat. Untuk melaksanakan program tersebut Pengadilan Agama Semarang membutuhkan rekanan dari suatu LBH/LSM/Kantor Advokat.

Hasil seleksi dari beberapa LBH/LSM/Kantor advokat yang mengajukan rekanan pelaksana pekerjaan pemberian jasa pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang, ditetapkan bahwa yang memenuhi persyaratan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah LPKBHI (Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Sebagaimana didasarkan atas perjanjian kerjasama (MoU) yang ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 22 bulan Maret tahun 2011 bertempat di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang Jl. Ronggolawe No. 6 Semarang 50149 oleh **DRS. JASIRUDDIN, SH, M.SI**, NIP.195702081985031003, Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA Kelas I A Kota Semarang yang berkedudukan di Jl. Ronggolawe No. 6 Semarang 50149 dan **DRS. H. MUSAHADI, M.Ag**, Direktur Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) (Lembaga Penyedia Layanan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKBHI, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fak 024- 7601291, 7624691 (*hunting*) Semarang 50185.

Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) didirikan pada tanggal 3 Maret 1999 dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo No: IN/12/R/HK.04/0413/1999

## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

tentang Pengangkatan Pengurus LPKBHI IAIN Walisongo. Dengan usianya yang memasuki 12 tahun, LPKBHI sudah banyak pengalaman dalam memberikan bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan salah satu institusi penting dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Karenanya, kehadiran LBH di tengah-tengah masyarakat menjadi sangat relevan dan menempati posisi strategis. Sesuai dengan hasil rapat pengurus tanggal 13 Maret 2011 diputuskan, bahwa mereka yang namanya tersebut dibawah ini diberi tugas untuk memberikan jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang mulai bulan April s/d Nopember 2011, mereka adalah:

1. **N a m a** : **Drs. Taufik. MH.**  
TTL : Pemalang, 25 Januari 1965  
Pekerjaan : Advokat dan Dosen  
Pendidikan : - S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
- S.2 Fakultas Hukum UII Yogyakarta
2. **N a m a** : **Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag.**  
TTL : Jepara, 01 Agustus 1963  
Pekerjaan : Advokat dan Dosen  
Pendidikan : - S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
- S2 IAIN Ar-Raniri Banda Aceh  
- S.3 (Kandidat Doktor IAIN Walisongo)  
Karir/Riwayat Jabatan : -Dosen IAIN Walisongo

## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

- Advokat
- Direktur LPKBHI IAIN
- Sekjen DPP APSI
- Wakil Sekjen DPP KAI
- POSBAKUM

### **3. N a m a : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**

TTL : Cirebon, 05 Juni 1965

Pekerjaan : Dosen/Advokat

Pendidikan : - S1 Fakultas Syari'ah IAIN  
Walisongo  
- S2. Magister Hukum Undip  
Jurusan Hukum Pidana

Karir/Riwayat Jabatan :

- Dosen IAIN Walisongo
- Advokat
- Direktur LPKBHI 2 Periode (2004 -2006, 2006-2008)
- Ketua DPP APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia)
- Wakil Bendahara DPP KAI (Kongres Advokat Indonesia)
- POSBAKUM

### **4. N a m a : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.**

TTL : Lamongan, 12 Oktober 1971

Pekerjaan : Dosen/Konsultan Hukum

Pendidikan : - S.1 Fakultas Syari'ah IAIN  
Walisongo  
- S.2 Ilmu Hukum Universitas  
Gadjah Mada



Karir/Riwayat Jabatan:

- Dosen IAIN Walisongo
- Bendahara LPKBHI
- Sekretaris POSKAPOLHAM
- POSBAKUM

5. **N a m a** : **Iman Fadhilah, SHI, M.SI.**  
TTL : Brebes, 25 Oktober 1982  
Pekerjaan : Dosen/Konsultan Hukum  
Pendidikan : - S.1 Fakultas Syari'ah IAIN WS  
- S.2 Hukum Islam IAIN WS

Karir/Riwayat Jabatan:

- Dosen Fakultas Syari'ah IAIN
- Wakil Sekretaris LPKBHI 2008-2009
- POSBAKUM

6. **N a m a** : **Ashari, S.Ag**  
TTL : Kudus, 30 Juli 1973  
Pekerjaan : Advokat  
Pendidikan : - S.1 Fakultas Syari'ah IAIN  
Walisongo Semarang  
- Pendidikan Khusus Profesi  
Advokat PERADI  
- DKPA KAI

Karir/Riwayat Jabatan:

- Advokat
- Anggota APSI 2007 hingga Sekarang
- Anggota LPKBHI 2007 hingga Sekarang
- POSBAKUM

## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

**7. N a m a** : **As'adul Yusro, S.HI.**  
**TTL** : Serang, 29 Maret 1980  
**Pekerjaan** :  
- Konsultan Hukum  
- Konsultan Madrasah Education Depelopment Project  
**Pendidikan** :  
- S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang  
- Pendidikan Khusus Profesi Advokat  
**Karir/Riwayat Jabatan:**  
- Konsultan Hukum  
- Konsultan Madrasah Education Depelopment Project  
- Anggota LPKBHI  
- POSBAKUM

**8. N a m a** : **Novita Dewi Masyithoh, SH. MH.**  
**TTL** : Semarang, 22 Oktober 1979  
**Pekerjaan** : Dosen/Konsultan hukum LPKBHI  
**Pendidikan** : - S.1 Ilmu Hukum Undip  
- S.2 Ilmu Hukum Undip  
**Karir/Riwayat Jabatan:**  
- Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo  
- Pengurus LPKBHI  
- PUSKAPOLHAM  
- POSBAKUM

**9. N a m a** : **Agus Salim Ridwan, SHI.**  
**TTL** : Purworejo, 22 Agustus 1985  
**Pekerjaan** : Konsultan Hukum  
**Pendidikan** : - S1 Syari'ah IAIN Walisongo  
Semarang  
**Karir/Riwayat Jabatan:** POSBAKUM

Berdasar data di atas menunjukkan bahwa yang memberikan Pos Bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang tahun 2011 sebanyak 9 orang. Secara yuridis ke sembilan orang tersebut telah memiliki keahlian dibidang hukum. Keahlian tersebut didasarkan pada pendidikan formal mereka semuanya sarjana hukum, baik sarjana hukum Islam maupun sarjana hukum umum. Ada 8 orang sarjana hukum Islam dan 1 orang sarjana hukum umum. Dari sembilan orang tersebut ada 4 orang sudah lulus program magister ilmu hukum dan 2 orang lulusan magister hukum Islam, dan seorang sedang menempuh program doktor, sedangkan yang 3 orang disamping secara formal baru lulusan s.1, tetapi mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan/pendidikan tentang keahlian profesi advokat dan sudah biasa memberikan bantuan hukum sebelum di POSBAKUM Pengadilan Agama Semarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang bertugas telah terpenuhi.

## **2. Pengadilan Agama Brebes**

Pengadilan Agama Brebes beralamat di Jl Yos Sudarso No. 6 Brebes Jawa Tengah, Telp/Fax (0283) 671442 Website: [www.pa-brebes.go.id](http://www.pa-brebes.go.id).

Keberadaan PA Brebes dikarenakan komunitas-komunitas masyarakat Islam, yang menuntut adanya lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1) Periode *Tahkim*, 2) *Tauilyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd*, 3) *Tauilyah Imamah*.



Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang Pengadilan Agama pada masa itu berlangsung di serambi masjid, sehingga Pengadilan Agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Demikian juga di Brebes, “kantor” pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Baru pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati.

Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m<sup>2</sup> dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700 m<sup>2</sup> tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77 m<sup>2</sup> dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75 m<sup>2</sup> dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sejak pembangunan mushalla tersebut PA Brebes belum memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas

bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru kemudian pada tahun 2010 dengan biaya Rp. xxxx (xxx milyar) dibangun gedung baru di Jl. Ahmad Yani dan Insya Allah tahun 2012 sudah bisa ditempati sebagai kantor yang lebih representatif.

PA Brebes mempunyai tugas pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Brebes mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-



undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

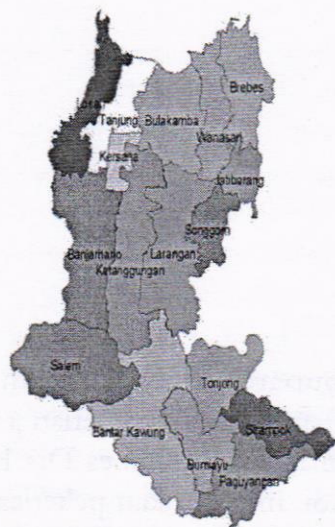
6. Fungsi Lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).



- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA Brebes nampak dalam peta sebagai berikut:



PA Brebes secara yuridis memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Wilayah Kabupaten Brebes, yang terbagi dalam 17 kecamatan, yang terdiri atas 292 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Brebes, yaitu:

## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

1. Banjarharjo
2. Bantarkawung
3. Brebes
4. Bulakamba
5. Bumiayu
6. Jatibarang
7. Kersana
8. Ketanggungan
9. Larangan
10. Losari
11. Paguyangan
12. Salem
13. Sirampog
14. Songgom
15. Tanjung
16. Tonjong
17. Wanasari

PA Kabupaten Brebes tahun 2011 juga mendapat DIPA pekerjaan pemberian jasa pelayanan Bantuan Hukum. Ketua PA Brebes Drs. H. Masykurin Hamid, SH, M.Si. memberikan pekerjaan pelayanan jasa bantuan hukum itu kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 234 Brebes Telp. (0283) 673402 setelah melaksanakan serangkaian kegiatan tahap-tahap penerimaan rekanan, dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor W11-A2/735a/KU.01/III/2011 tanggal 4 Maret 201, kegiatan POSBAKUM di PA Brebes dilaksanakan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brebes didirikan pada tahun 1999, selama 10 bulan, sejak bulan Maret s/d Desember 2011 menjalankan pekerjaan layanan jasa POSBAKUM bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat.

Tenaga yang disiapkan Hascaryo Wimbo, SH. selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebanyak 6 orang. Mereka semuanya sarjana hukum dan sekaligus sebagai advokat, yaitu Nur Eli Eliyah, SH., Soleh, SH., Abdul Basir, SH., Slamet Sutanto, SH., Hascaryo Wimbo, SH., Edi Satrio, SH.<sup>1</sup>. Tidak ada seorangpun dari tenaga yang disiapkan untuk POSBAKUM yang berlatar-belakang pendidikan sarjana syariah<sup>2</sup>.

#### **A. Porsi dan Cakupan Layanan POSBAKUM**

Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mahendra, SH. Pensek Pengadilan Agama Brebes, tanggal 28 Desember 2011.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Soleh, salah satu orang yang memberikan jasa Posbakum di PA Brebes Jawa Tengah.



1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf a, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau yang berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Ijin beristri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi perkawinan;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;

11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
12. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
13. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
14. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
15. Pencabutan kekuasaan wali;
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
17. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
18. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
19. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan penagangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
20. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan huruf i “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;

4. Reasuransi syari'ah;
5. Reksa dana syari'ah;
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;
8. Pembiayaan syari'ah
9. Pengadaian syari'ah;
10. Dana pension lembaga keuangan syari'ah; dan
11. Bisnis syari'ah.<sup>3</sup>

Selain pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, PA juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara sebagaimana di atur dalam pasal 50 dan 52A, yaitu:  
Pasal 50

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Dalam penjelasan ayat (2) dikatakan bahwa  
"Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan

---

<sup>3</sup> Penjelasan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49;



Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan dilingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang keberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.<sup>4</sup>

Melihat pasal 49 dan 50 di atas, Pengadilan seharusnya menyediakan layanan hukum terhadap perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Berdasar pada perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama kelas IA Kota Semarang dengan Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Semarang, yang ditandatangani Pada hari ini Selasa, tanggal 22 bulan Maret tahun 2011 bertempat di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang Jl. Ronggolawe No. 6 Semarang 50149, oleh **DRS. JASIRUDDIN, SH, M.SI**, NIP.195702081985031003, Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA Kelas IA Kota Semarang yang berkedudukan di Jl. Ronggolawe No. 6 Semarang 50149 dan **DRS. H. MUSAHADI, M.Ag**, Direktur Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) (Lembaga Penyedia Layanan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKBHI, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fak 024- 7601291, 7624691 (*bunting*) Semarang 50185. Dan perjanjian antara Ketua Pengadilan Agama Brebes dengan Ketua LBH Brebes tertanggal 4 Maret 2011 Pada BAB III Pasal 3 disebutkan bahwa:

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan



pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian Advis dan konsultasi hukum.

3. Pengaturan dan daftar pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini.

Dengan demikian layanan yang diberikan kepada masyarakat berkisar pada pelayanan bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian Advis dan konsultasi hukum.

POSBAKUM LPKBHI dalam memberikan jasa layanan di Pengadilan Agama Semarang selama 8 (delapan) bulan mulai bulan April s/d Nopember 2011 adalah sebagai berikut:



## *Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM*

Tabel B.1  
Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2011<sup>5</sup>

Bulan	Jenis Jasa Hukum				Jmlh
	Informasi	Konsultasi	advis	Pembuatan surat gugatan/permohon	
April	128	80	18	184	410
Mei	112	69	26	158	365
Juni	2	-	-	172	174
Juli	8	4	3	153	168
Agus	18	21	7	78	124
Sept	30	29	10	183	252
Okt	16	25	5	182	228
Nop	7	8	3	186	202
Juml	321	236	72	1196	1923

Berdasar tabel B.1 di atas menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap layanan bantuan hukum sangat tinggi untuk melihat frekwensi masing-masing dapat dilihat dalam table bulanan sebagai berikut:

<sup>5</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan Nopember 2011.

Tabel B.2

Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan April Tahun 2011<sup>6</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	184	44.88%
2	Pemberian Advis	18	4.39%
3	Pemberian konsultasi	80	19.51%
4	Pemberian informasi	128	31.22%
	Jumlah	410	100%

Tabel B.3

Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan Mei Tahun 2011<sup>7</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	158	43.29%
2	Pemberian Advis	26	7.12%
3	Pemberian konsultasi	69	18.90%
4	Pemberian informasi	112	30.68%
	Jumlah	365	100%

<sup>6</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan April 2011.

<sup>7</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan Mei 2011.

Tabel B.4  
Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan Juni Tahun 2011<sup>8</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	172	98.85%
2	Pemberian Advis	-	0
3	Pemberian konsultasi	-	0
4	Pemberian informasi	2	1.15%
	Jumlah	174	100%

Tabel B.5  
Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan Juli Tahun 2011<sup>9</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	153	91.07%
2	Pemberian Advis	3	1.79%
3	Pemberian konsultasi	4	2.38%
4	Pemberian informasi	8	4.76%
	Jumlah	168	100%

<sup>8</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan Juni 2011.

<sup>9</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan Juli 2011.



Tabel B.6

Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan Agustus Tahun 2011<sup>10</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	78	62.90%
2	Pemberian Advis	7	5.65%
3	Pemberian konsultasi	21	16.93%
4	Pemberian informasi	18	14.51%
	Jumlah	124	100%

Tabel B.7

Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan September Tahun 2011<sup>11</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	183	72.62%
2	Pemberian Advis	10	3.96%
3	Pemberian konsultasi	29	11.51%
4	Pemberian informasi	30	11.90%
	Jumlah	252	100%

<sup>10</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan Agustus 2011.

<sup>11</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan September 2011.

Tabel B.8  
Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan Oktober Tahun 2011<sup>12</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	182	79.82%
2	Pemberian Advis	5	2.19%
3	Pemberian konsultasi	25	10.96%
4	Pemberian informasi	16	7.02%
	Jumlah	228	100%

Tabel B.9  
Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Semarang Bulan Nopember Tahun 2011<sup>13</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Pembuatan surat permohonan dan surat gugatan	186	92.08%
2	Pemberian Advis	3	1.48%
3	Pemberian konsultasi	8	3.97%
4	Pemberian informasi	7	3.47%
	Jumlah	202	100%

<sup>12</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan Oktober 2011.

<sup>13</sup> Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI bulan Nopember 2011.

Berdasar pada tabel B.2 s/d B 9 di atas menunjukkan bahwa masyarakat kota Semarang sangat membutuhkan layanan bantuan hukum. Layanan pembuatan surat gugatan/permohonan menempati urutan pertama jumlahnya dari bulan ke bulan berikutnya, tabel B.2 mencapai 184 (44.88), B.3 mencapai 158 (43.29), B.4 mencapai 172 (98.85), B5. Mencapai 153 (91.07), B.6 mencapai 78 (62.90), B. 7 mencapai 183 (72,68), B.8 mencapai 182 (79.82), dan B.9 mencapai 186 (92.08).

Menempati urutan kedua animo masyarakat kebutuhan akan informasi tentang persyaratan dan cara mengajukan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, sebagaimana terlihat dari tabel B.2 mencapai 128 (21.22), B.3 mencapai 112 (30.68), B.4 mencapai 2 (1.15), B5. Mencapai 8 (4.76%), B.6 Menempati urutan kedua adalah konsultasi masalah yang sedang mereka hadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya Mencapai 21 (16.93%), B.7 mencapai 30 (11.90), B. 8 Menempati urutan kedua adalah konsultasi mencapai 25 (10,96), B.9 Menempati urutan kedua adalah konsultasi mencapai 8 (3,97). Menempati urutan ketiga adalah jasa konsultasi kemudian terakhir bidang advis.

Untuk melihat peran Pos Bantuan Hukum terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama kota Semarang dapat di lihat dalam tabel berikut ini:



Tabel B.10  
Laporan Perkara  
Pengadilan Agama Semarang Tahun 2011<sup>14</sup>

No.	Bulan	Sisa bln lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa akhir bulan
1	Jan	638	255	180	713
2	Pebr	713	243	208	748
3	Maret	748	264	247	765
4	April	765	238	240	763
5	Mei	763	238	240	763
6	Juni	763	237	231	769
7	Juni	769	213	271	709
8	Agus	709	120	198	631
9	Sept	631	281	203	709
10	Okt	709	293	238	764
11	Nop	764	174	245	793
12	Des	793	212	256	749

Berdasar pada table B.10 khususnya perkara masuk di Pengadilan Agama Semarang dikaitkan dengan jumlah perkara yang dilayani Pos Bantuan Hukum LPKBHI di Pengadilan Agama Semarang dapat terlihat, bahwa andil Pos Bantuan Hukum sangat besar. Untuk melihat lebih mudah andil itu akan disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

<sup>14</sup> Data diambil dari laporan tahunan Pengadilan Agama Semarang tahun 2011

Tabel B.11

Perbandingan perkara masuk di Pengadilan Agama dengan yang dilayani POSBAKUM tahun 2011

No	Bulan	Perkara Masuk di PA Semarang	Layanan POSBAKUM	Frekwensi
1	April	238	184	77.31%
2	Mei	238	158	66.39%
3	Juni	237	172	72.57%
4	Juni	213	153	71.83%
5	Agus	120	78	65%
6	Sept	281	183	65.12%
7	Okt	293	182	62.12%
8	Nop	174	186	106.89%
Jumlah		1794	1296	72.24%

Berdasar pada tabel B.11 terlihat bahwa jasa layanan POSBAKUM memiliki andil yang sangat besar. Dari bulan April s/d Nopember 2011 penyelenggaraan POSBAKUM setiap bulannya lebih dari 65% perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang, pembuatan surat gugatan cerai gugat, dan permohonan ijin ikrar talak, hadhanah, isbat nikah, pembetulan nama dalam akta nikah, wali adhal, dispensasi nikah, penetaan ahli waris, poligami melalui jasa POSBAKUM, dan bahkan pada bulan Nopember mencapai 106.24% dari perkara yang dilayani POSBAKUM.

Menurut Ashari, S.Ag bahwa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran POSBAKUM, rata-rata setiap harinya lebih dari 25 orang yang datang ke POSBA-



KUM di Pengadilan Agama Semarang, seringkali mereka harus menunda untuk esok harinya, karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia. Setiap hari kerja, Hari Senin s/d Kamis dalam jadwal pelayanan diberikan mulai jam 08.00 s/d jam 13.00 WIB. Namun karena banyaknya permintaan pelayanan, sehingga petugas POSBAKUM datang lebih awal, yaitu jam 07.00 s/d jam 15.00 WIB.<sup>15</sup>

Masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendapatkan jasa layanan secara gratis di POSBAKUM Pengadilan Agama Semarang. Untuk konsultasi dan advis mereka tanpa membawa persyaratan apapun tetap dilayani, namun untuk membuat surat gugatan dan atau surat permohonan diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan yaitu:

1. Formulir berisi/perihal permohonan pelayanan POSBAKUM yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang. Dengan dilengkapi foto kopi KTP dan akta nikah
2. Mengisi formulir surat pernyataan tidak mampu dan menandatangani.

Lebih lanjut Ashari, S.Ag. mengemukakan bahwa masyarakat pengguna jasa POSBAKUM, baik dari kalangan tidak mampu atau mereka yang merasa tidak mampu sama-sama menggunakan jasa POSBAKUM. Petugas tidak dapat membatasi mereka,

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ashari, S.Ag salah satu petugas Posbakum dari LPKBHI Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 8 Desember 2011



walaupun sudah ada ketentuan bahwa POSBAKUM ini hanya diperuntukan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar jasa advoka. Ada masyarakat yang bekerja sebagai pegawai BUMN, PNS dan pengusaha, namun mereka menginginkan jasa POSBAKUM dan bersedia mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak mampu, sehingga petugas POSBAKUM tidak dapat menolak mereka.<sup>16</sup>

Layanan POSBAKUM tidak hanya bagi masyarakat yang tidak mampu dibidang hukum, tetapi ada advokat yang karena belum menguasai pembuatan gugatan tertentu meminta bantuan kepada POSBAKUM, dengan modus memerintahkan kepada seseorang untuk datang ke POSBAKUM, namun karena tidak membawa persyaratan sehingga ditunda, kemudian karena ditunda advokat yang bersangkutan datang sendiri ke POSBAKUM.<sup>17</sup>

Untuk Pelayanan POSBAKUM di PA Brebes berjalan selama 10 bulan atau selama 208 hari. Untuk melihat jumlah perkara yang dilayani POSBAKUM PA Brebes dapat dilihat secara sampling selama tiga bulan terakhir, yaitu bulan September, Oktober dan Desember 2011 sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Novita Dewi Masyitho, SH, MH, petugas POSBAKUM LPKBHI Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang di Kantor pada tanggal 2 Desember 2011.

Tabel B.12  
Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Brebes Bulan September Tahun 2011<sup>18</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi	Prodeo	Frekwensi
1	Permohonan cerai talak	15	23.44%	4	26,67%
2	Gugatan cerai	38	59.37%		
3	Konsultasi Cerai Talak	6	9.36%		
4	Konsultasi Gugat Cerai	5	7.81%		
Jumlah		64	100%	4	6,2%

Berdasar data di atas menunjukkan bahwa POSBAKUM di PA Brebes dalam bulan September memberikan pelayanan sebanyak 64 perkara, yang terdiri dari 15 (23,44%) perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami, 38 (59.37%) perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, 6 (9.36%) perkara konsultasi tentang pengurusan permohonan cerai talak, dan 5 (7.81%) perkara konsultasi gugatan perceraian dan yang mengajukan permohonan cerai talak secara cuma-cuma (*prodeo*) sebanyak 4 perkara (26,67%).

<sup>18</sup> Data bersumber dari laporan register Pos bantuan Hukum Bulan September 2011, tertanggal 30 September 2011.

Tabel B.13

Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Brebes Bulan Oktober Tahun 2011<sup>19</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi	Prodio	Frekwensi
1	Permohonan cerai talak	12	34.29%	3	25%
2	Gugatan cerai	10	28.57%	6	60%
3	Konsultasi Cerai Talak	5	14.29%	3	60%
4	Konsultasi Gugat Cerai	3	8.57%	3	100%
5	Konsultasi hadhanah	1	2.86%		
6	Konsultasi nafkah anak	1	2.86%		
7	Konsultasi isbat nikah	3	8.57%		
Jumlah		35	100%	15	42.86%

Berdasar pada data di atas menunjukkan bahwa POSBAKUM dalam bulan Oktober 2011 memberikan pelayanan sebanyak 35 perkara, yang terdiri dari 12 (34.29%) perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami, 10 (28.57%) perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, 5 (14.29%) perkara konsultasi tentang pengurusan permohonan cerai talak, dan 3 (8.57%) perkara konsultasi gugatan perceraian, konsultasi *hadhanah* 1 (2.86%) perkara,

<sup>19</sup> Data bersumber dari laporan register Pos bantuan Hukum Bulan Oktober 2011, tertanggal 31 Oktober 2011.



## Profil Pelaksanaan Jasa Layanan POSBAKUM

konsultasi nafkah anak *hadhanah* 1 (2.86%) perkara konsultasi permohonan isbat nikah 3 (8.57%) dan yang mengajukan permohonan cerai talak secara cuma-cuma (*prodeo*) sebanyak 15 (42.86%) perkara.

Tabel B.14  
Jenis Layanan Jasa Bantuan Hukum  
Di PA Brebes Bulan Desember Tahun 2011<sup>20</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi	Prodio	Frekwensi
1	Permohonan cerai talak	10	23.81%	3	31%
2	Gugatan cerai	19	45.24%	6	32%
3	Konsultasi Cerai Talak	4	9.52%	3	75%
4	Konsultasi Gugat Cerai	8	19.05%	3	37%
5	Konsultasi hadhanah	1	2.38%		
Jumlah		42	100%	15	35,7%

Berdasar pada data di atas menunjukkan bahwa POSBAKUM dalam bulan Desember 2011 memberikan pelayanan sebanyak 42 perkara, yang terdiri dari 10 (23.81%) perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami, 19 (45.24%) perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, 4 (9.52%) perkara konsultasi tentang pengurusan permohonan cerai talak, dan 8 (19.05%) perkara

<sup>20</sup> Data bersumber dari laporan register Pos bantuan Hukum Bulan Desember 2011, tertanggal 30 Desember 2011.

konsultasi gugatan perceraian, konsultasi wali hakim (2.86%) perkara, dan yang mengajukan permohonan cerai talak secara Cuma-Cuma (prodio) sebanyak 15 (35.7%) perkara.

Secara umum jasa Layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Brebes dilayani setelah terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa
2. Membuat surat pernyataan yang berisi tentang ketidak- mampuan membuat surat gugatn/ permohonan dan juga tidak mampu membayar advokat. Oleh karena itu mohon kepada Pos Bantuan hukum yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama dapat membuat surat gugatan/ permohonan dimaksud.
3. Membuat Surat Pernyataan tidak mampu untuk membayar jasa bantuan hukum, sehubungan dengan permohonan/gugatan cerai di PA Brebes, surat ini ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua PA Brebes.
4. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua PA Brebes, yang isinya pengajuan permohonan untuk mendapatkan layanan jasa bantuan hukum yang berada POSBAKUM Pengadilan Agama Brebes, dengan melampirkan foto kopi KTP, akta Nikah dan Kartu Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas yang demikian maka POSBAKUM bekerja berdasar atas ketentuan sebagai berikut:



- a. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- b. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- c. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- d. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukan ke Ketua Pengadilan Agama.
- e. Berhak mendapatkan sarana prasarana serta imbalan jasa
- f. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas

## **B. Sebaran Perkara Layanan Jasa POSBAKUM**

Jasa layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Brebes didominasi perkara perceraian. Perceraian dibedakan antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak lazim disebut juga sebagai permohonan ijin ikrar talak yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak istri.

Adapun langkah-langkah pengajuan cerai talak yang dilakukan Pemohon (Suami) adalah sebagai berikut:



1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
4. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
5. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
6. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
7. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

Sedangkan langkah-langkah pengajuan cerai gugat yang harus dilakukan Penggugat (Istri) adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Brebes:
  - a. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
  - b. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan



Pengadilan Agama Brebes (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Adapun proses penyelesaian perkara meliputi:

1. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Brebes.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama Brebes untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan:
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (PERMA No. 2 Tahun 2003);
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada:
  - Pengadilan Agama (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
  - Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara



- membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Brebes:
- Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
  - Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
  - Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
3. Permohonan tersebut memuat:
- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Perkara Perceraian mondominasi layanan Jasa POSBAKUM di Pengadilan Agama Semarang dan Brebes. Untuk sebaran perkara di PA Brebes terlihat dalam table B.12,13 dan 14 di atas, sedangkan untuk di Pengadilan Agama Semarang pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan secara umum, untuk lebih terperinci disajikan atau diuraikan sebagai berikut.

Tabel C.1  
Sebaran perkara Jasa POSBAKUM  
Pengadilan Agama Semarang bulan Mei 2011<sup>21</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Permohonan cerai talak	56	5.34%
2	Gugatan cerai	97	6.58%
3	Permohonan Perubahan nama	1	0.27%
4	Ijin Poligami	2	0.55%
5	Dispensasi nikah	1	0.27%
6	Hadhanah	1	0.27%
7	Informasi	112	0.68%
8	Konsultasi	69	8.90%
9	Advis	26	7.12%
Jumlah		365	100%

Berdasar pada tabel C.1 menunjukkan bahwa POSBAKUM LPKBHI Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dalam bulan Mei 2011 memberikan pelayanan perkara yang didominasi oleh perkara perceraian 153 (41.92%), yang terdiri dari permohonan cerai talak 56 (15.34%) perkara, perkara cerai gugat 97 (26.58%), disusul jasa layanan informasi 112 (30.68%), kemudian urutan ketiga ditempati jasa layanan konsultasi 69 (18.80%), kemudian advis 26 (7.12%), ijin poligami sebanyak 2 (0.55%), dan

<sup>21</sup> Data diperoleh dari buku register pendaftaran layanan POSBAKUM LPKBHI di PA Semarang.



pembuatan surat Permohonan Perubahan nama, dispensasi nikah serta hadhanah masing-masing 1 (0.27%) perkara.

Tabel C.2  
Sebaran perkara Jasa POSBAKUM  
Pengadilan Agama Semarang bulan Juni 2011<sup>22</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Permohonan cerai talak	52	25.36%
2	Gugatan cerai	125	60.97%
3	Permohonan Perubahan nama	4	1.95%
4	Ijin Poligami	2	0.97%
5	Dispensasi nikah	1	0.487%
6	Konsultasi	20	9.76%
7	Wali Adhal	1	0.49%
Jumlah		205	100%

Berdasar pada tabel C.2 dapat dikemukakan bahwa selama bulan Juni 2011 jasa layanan POSBAKUM di PA Semarang, menempati angka tertinggi masih jasa masalah perceraian, cerai gugat sebanyak 125 (60.97%), kemudian perkara cerai talak 52 (25.36%) perkara, disusul permohonan konsultasi 20 (9.76%), disusul Permohonan Perubahan nama 4 (1.95%), ijin poligami 2 (0.97%) dan terakhir dispensasi nikah dan wali adhol masing-masing 1 (0.49%) perkara.

<sup>22</sup> Data diperoleh dari buku register pendaftaran layanan POSBAKUM LPKBHI di PA Semarang

Tabel C.3  
Sebaran perkara Jasa POSBAKUM  
Pengadilan Agama Semarang bulan Oktober 2011<sup>23</sup>

No	Jenis bantuan	Jumlah	Frekwensi
1	Permohonan cerai talak	71	31.14%
2	Gugatan cerai	108	47.37%
3	Informasi	16	7.02%
4	Konsultasi	25	10.96%
5	Dispensasi nikah	3	1.32%
6	Advis	5	2.19%
Jumlah		228	100%

Berdasar pada tabel C.3 dapat dikemukakan bahwa selama bulan Oktober 2011 jasa layanan POSBAKUM di PA Semarang, menempati angka tertinggi masih jasa masalah perceraian, cerai gugat sebanyak 108 (47.37%), kemudian perkara cerai talak 71 (31.14%) perkara, kemudian permohonan konsultasi 25 (10.96%), disusul Informasi 16 (7.02%), kemudian advis 5 (2.19%), dan terakhir Dispensasi nikah 3 (1.32%) perkara.

<sup>23</sup> Data diperoleh dari buku register pendaftaran layanan POSBAKUM LPKBHI di PA Semarang.

### **C. Kontribusi POSBAKUM Terhadap Penegakan Hukum**

#### **1. Pengadilan**

Hukum tidak memandang golongan, dihadapan hukum setiap orang dianggap sama (*equity before the law*), sehingga setiap orang berhak mendapatkan layanan yang sama dihadapan hukum. Untuk itu berdasarkan SK KMA-RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011, disebutkan bahwa para pencari keadilan memiliki beberapa hak yang sama sebagai berikut:

- a. Tata cara atau prosedur beracara di pengadilan dan upaya hukum atas putusan pengadilan.
- b. Besarnya biaya proses perkara di pengadilan.
- c. Jadwal Persidangan pengadilan.
- d. Perkembangan keadaan perkara.
- e. Tata cara beracara secara *prodeo* (cuma-cuma).
- f. Mendapatkan Bantuan Hukum.
- g. Memperoleh salinan putusan pengadilan.
- h. Mengajukan keberatan atas pelayanan informasi pengadilan.
- i. Pengumuman pengadaan barang dan jasa di pengadilan.
- j. Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di pengadilan.
- k. Pengumuman penerimaan calon pegawai baru di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- l. Peraturan perundang-undangan produk Mahkamah Agung RI.
- m. Informasi tentang data kepegawaian pegawai pengadilan.



- n. Informasi tentang agenda kerja pimpinan pengadilan.
- o. Informasi tentang tindak lanjut pengaduan masyarakat

Untuk mendapatkan hak mereka, para pencari keadilan dibenturkan dengan beberapa faktor, faktor ketidaktahuan mereka kepada siapa mereka harus bertanya, dimana tempat mereka bertanya, faktor finansial, faktor keterjangkauan waktu dan tenaga, dan lain sebagainya.

Keterbatasan SDM di Pengadilan Agama menjadi problem bagi para pencari keadilan yang menginginkan mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam SEMA di atas, sehingga untuk para pencari keadilan seringkali tidak tuntas dalam mendapatkan layanan.

Kehadiran POSBAKUM sangat membantu proses pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh para pencari keadilan, mengingat tugas yang selama ini diemban oleh pengadilan dapat diambil alih oleh POSBAKUM, utamanya dalam hal pembuatan surat gugatan, surat permohonan dan konsultasi serta advis.

## **2. Masyarakat**

Bagi masyarakat kehadiran POSBAKUM bagaikan angin segar, masyarakat sangat mendukung keberadaan POSBAKUM, utamanya bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat dan atau biaya perkara.

## BAB V

# PROBLEM PELAKSANAAN POSBAKUM

Hak atas bantuan hukum sesungguhnya telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).



Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai. Padahal idealnya, negara harus memiliki ketentuan normatif penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bisa menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama dalam hal ini menjadi sangat strategis sebagai instrumen untuk penjaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin dalam mencari keadilan.

Meskipun demikian, sebagai produk baru Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non judicial maupun problem judicial. Problem-problem tersebut dapat disimak dalam uraian berikut ini:

## **A. Problem Non Judicial**

### **1. Fasilitas**

Program Pos Bantuan Hukum atau sering disebut dengan POSBAKUM merupakan hal yang baru dan yang pertama pada tahun 2011, sehingga dari segi kesiapan sarana-prasarana masih sangat kurang dari



sempurna. Pengadilan sudah berusaha secara maksimal untuk menyiapkan tempat yang representatif, tetapi mengingat terbatas ruang yang ada dan dana yang tidak teralokasikan sehingga Pengadilan Agama memanfaatkan ruangan yang sudah ada.

Di Pengadilan Agama Semarang ruang yang digunakan untuk POSBAKUM adalah ruang tunggu. Ruangan ini menjadi satu dengan ruangan yang digunakan untuk ruang tunggu pendaftaran perkara. Dalam ruangan ini tersedia tiga meja dan enam kursi, tiga kursi untuk pemberi jasa bantuan hukum dan tiga kursi yang lain digunakan untuk mereka yang menginginkan jasa POSBAKUM. Bagi yang menunggu giliran harus antri duduk bersama-sama dengan mereka yang hendak mendaftar perkara dan atau layanan lain dari Pengadilan Agama.

Melihat keberadaan ruangan yang dapat dikatakan bersifat umum dan terbuka, sehingga seringkali masyarakat merasa kurang tenang dan tidak bisa menyampaikan persoalan perkaranya secara detail, karena mereka merasa malu atau tidak nyaman apabila perkaranya diketahui orang lain.

Ruangan yang berukuran kurang lebih  $4 \times 5 \text{ m}^2$  digunakan untuk kegiatan POSBAKUM dan layanan umum Pengadilan Agama Semarang, seperti pendaftaran perkara, pendaftaran surat kuasa, pengambilan putusan, pengambilan sisa perkara, penambahan biaya panjar perkara dan konsultasi tentang persidangan dan lain-lain. Juga pendaftaran perkara di PA Semarang harus antri, sehingga menjadikan ruangan penuh orang setiap harinya.

Adapun ruang POSBAKUM di Pengadilan Agama Brebes diberikan ruangan khusus berukuran kurang lebih  $3 \times 3 \text{ m}^2$ , didalamnya ada 2 meja dan 4 kursi dan peralatan kantor komputer, printer dan lainnya. Masyarakat yang membutuhkan jasa POSBAKUM tidak terlalu banyak sehingga ruangan tersebut masih mencukupi, dan terkesan longgar.

## 2. Waktu

Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Semarang diberikan pada hari kerja, mulai hari Senin hingga hari Kamis. Untuk hari Jumat tidak ada pelayanan jasa POSBAKUM. Pelayanan POSBAKUM pada dasarnya diberikan sesuai jam kerja, namun kenyataannya seringkali diberikan mulai jam 07.00 s/d 15.00 WIB. Hal itu dimaksudkan karena para pencari jasa layanan sudah antri sejak pagi, sehingga petugas POSBAKUM harus memberikan jasa pelayanan sampai semua yang membutuhkan terlayani semuanya.

Adapun yang bertugas memberikan jasa POSBAKUM setiap harinya berjumlah 3 orang, mereka bertugas secara bergantian. Hari Senin yang bertugas Drs. Taufik CH.MH., As'adul Yusro, SHI. dan Agus Salim Ridwan, SHI. Hari Selasa Drs. H. Eman Sulaeman, MH., Iman Fadhillah, SHI., M.S.I. dan Agus Salim Ridwan, SHI. Hari Rabu Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., Ashari, S.Ag. dan Agus Salim Ridwan, SHI., Hari Kamis Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag., Novita Dewi Masyithoh, SH., MH. dan Agus Salim Ridwan, SHI.

Untuk waktu pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Brebes dilakukan setiap hari kerja,



mulai hari Senin hingga hari Jumat, jam 09.00 s/d 14.00 WIB.

Berdasar pada daftar hadir LBH Brebes di POSBAKUM Pengadilan Agama Brebes, bahwa setiap harinya mereka yang bertugas memberikan jasa layanan sebanyak 4 (empat) orang secara bergantian, dengan jadwal sebagaimana terlampir

### 3. Sosialisasi

Keberadaan Pos Bantuan Hukum sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu dibidang finansial dan atau yang tidak tahu tentang hukum. POSBAKUM sebagai program baru belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat belum banyak memanfaatkan POSBAKUM dalam proses penyelesaian perkara mereka.

Menurut sebagian besar masyarakat yang datang di Pos Bantuan Hukum mengatakan bahwa mereka pada mulanya tidak mengetahui Pos Bantuan Hukum sebelum datang ke Pengadilan Agama. Lebih dari itu mereka juga tidak tahu apa itu POSBAKUM, jasa apa yang akan diberikan POSBAKUM kepada mereka.

Setelah berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mengetahui POSBAKUM melalui informasi yang diberikan oleh para pengguna POSBAKUM sebelumnya, sehingga informasi itu sangat efektif. Mereka banyak yang mengetahui layanan POSBAKUM melalui mekanisme "*gethok tular*".

Bapak Mahendra, SH. mengatakan bahwa sebelum POSBAKUM dilaksanakan telah diadakan sosialisasi POSBAKUM, dengan cara mengundang para



Kepala Desa di Pengadilan Agama Brebes. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan Kepala Desa sebagai ujung tombak penyelesaian perkara di tingkat desa mampu memberikan informasi kepada masyarakatnya, bahwa apabila perkara sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat diselesaikan di Pengadilan dengan dibantu oleh POSBAKUM secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak dapat membayar jasa advokat.

## **B. Problem Judisial**

### **1. Penentuan kategori masyarakat miskin**

Bantuan hukum adalah media bagi warga negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara struktural.

Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup

dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada dasarnya mencari keadilan di pengadilan dibutuhkan biaya, sehingga seringkali masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi mengalami kendala untuk mendapatkan keadilan, belum lagi jika dihadapkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa advokat, sehingga nyaris mereka tidak dapat mendapatkan keadilan dalam persoalan yang mereka hadapi.

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan dan permohonan.

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat dan atau tidak mampu membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No.10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama.

Untuk itu POSBAKUM dalam menjalankan pemberian pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas, dan perlindungan anak.



Sedangkan prosedur pelayanan yang dilakukan setelah formulir diisi pemohon bantuan hukum dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau kepala Desa; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Berdasar hal tersebut berarti, masyarakat yang dapat mengakses jasa POSBAKUM hanyalah mereka yang tidak mampu, baik yang tidak mampu membayar biaya perkara dan atau yang tidak mampu membayar jasa advokat.

Dalam prakteknya petugas POSBAKUM kesulitan menolak masyarakat yang sebenarnya secara finansial mampu membayar jasa advokat, seperti mereka yang bekerja sebagai pegawai BUMN, PNS, pegawai bank, pejabat pemerintah dan pengusaha, namun karena mereka mau mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama, sehingga mereka juga tetap dilayani oleh POSBAKUM.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Iman Fadhilah, S.H.I., M.S.I. petugas posbakum LPKBHI IAIN Walisongo Semarang, pada tanggal 11 Nopember 2011



Hal senada telah dikonfirmasi dengan bapak salah seorang dari Pengadilan Agama, orang tersebut mengatakan selama pencari bantuan POSBAKUM mau mengisi dan menandatangani pernyataan tidak mampu, maka ia akan dilayani. Dengan demikian secara legal formal persyaratan tersebut mudah dipenuhi oleh siapapun, baik yang mampu secara finansial maupun yang tidak memiliki kemampuan, karena persyaratan tersebut formulirnya sudah disiapkan, hanya dengan mengisinya kemudian dikumpulkan dan yang memintakan tandatangan persetujuan dari ketua Pengadilan Agama adalah petugas POSBAKUM. Akan menjadi lain ceritanya apabila persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama yang meminta adalah pengguna jasa POSBAKUM secara langsung. Tentunya mereka yang merasa dirinya mampu membayar jasa advokat akan enggan, meminta tanda tangan persetujuan dari ketua Pengadilan Agama.

## 2. Perkara-perkara yang kompleks

Menurut Novita Dewi Masyithoh perkara yang dikonsultasikan, dan dimintakan bantuan pembuatan gugatan dan atau permohonan sifatnya masih sederhana, persoalan yang sering diajukan berkisar pada persoalan pembuatan gugatan/permohonan perceraian, hadhanah, dispensasi nikah, poligami, wali adhal, pembetulan nama dalam surat nikah, pengangkatan anak, hak asuh, dan adopsi.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh As'adul Yusro S.HI,<sup>2</sup> sehingga hampir tidak ada kendala yang dihadapi oleh petugas Pos Bantuan Hukum. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh pemberi jasa POSBAKUM maka tidak ada kendala apapun.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Iman Fadhilah., M.S.I, petugas POSBAKUM LPKBHI IAIN Walisongo Semarang, pada tanggal 11 Nopember 2011.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian mengenai Studi Evaluatif Pelaksanaan POSBAKUM ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun POSBAKUM merupakan program baru dari Mahkamah Agung yang *dilaunching* pertamakali pada tahun 2011, namun secara umum pelaksanaannya di Pengadilan Agama di Jawa Tengah sangat baik. Hal ini setidaknya bisa dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah adalah orang-orang yang memiliki kompetensi akademik dan kompetensi professional di bidang praktek hukum. Meskipun untuk POSBAKUM di Pengadilan Agama Brebes, seluruh petugasnya berlatar-belakang pendidikan hukum, dan tidak satupun yang berlatar belakang pendidikan syari'ah, 2) Porsi, cakupan dan sebaran perkara layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang sangat besar dan beragam mencakup hampir semua perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama
2. Layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah terhadap pembangunan hukum sangat besar, terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang



tidak mampu. POSBAKUM ini disamping berkontribusi dalam layanan hukum juga berkontribusi dalam pendidikan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Bagi lembaga Pengadilan, layanan POSBAKUM ini sangat membantu percepatan proses penanganan perkara, mengingat layanan ini sebelumnya dilakukan oleh SDM yang sangat terbatas.

3. Problem-problem yang muncul dalam layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah mencakup dua kategori yakni problem non judisial dan problem judisial. Problem non judisial paling utama adalah terbatasnya fasilitas layanan, terutama tempat yang kurang layak untuk pemberian layanan POSBAKUM. Sedangkan problem judisial yang dihadapi menyangkut penentuan kategori miskin dan bantuan hukum untuk perkara-perkara yang kompleks.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian, maka beberapa hal yang bisa direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk bisa menyelami tehnik hukum yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, maka Lembaga yang diamanati untuk melaksanakan layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama supaya menyediakan petugas yang berlatar-belakang pendidikan syari'ah, bukan semata-mata sarjana hukum umum.
2. Masyarakat yang datang ke POSBAKUM pada umumnya adalah mereka yang membawa masalah, konflik ataupun

Sengketa. Pada tingkat tertentu mereka seringkali memiliki hambatan psikologis untuk mengutarakan masalah yang mereka hadapi. Mereka membutuhkan suasana yang nyaman untuk mengutarakan problem, konflik maupun sengketa yang mereka hadapi. Untuk kepentingan ini, maka Pengadilan Agama perlu menyediakan tempat yang representatif untuk proses konsultasi dan pemberian jasa layanan POSBAKUM lainnya.

3. Oleh karena sebaran perkara layanan sebagian besarnya menyangkut lembaga perkawinan, maka petugas POSBAKUM perlu untuk menyisipkan pesan-pesan moral penguatan lembaga perkawinan dalam proses pemberian layanan POSBAKUM. Hal ini dirasa penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lembaga perkawinan dan penguatan rumah tangga.
4. Untuk efektifitas POSBAKUM, Pengadilan Agama dan Lembaga Pelaksana POSBAKUM perlu meninjau ulang jumlah petugas layanan POSBAKUM agar sebanding dengan besarnya jumlah masyarakat pengguna layanan jasa POSBAKUM. Rasio yang ideal mengenai hal ini akan sangat berdampak pada efektifitas dan kenyamanan serta kualitas layanan POSBAKUM.
5. Oleh karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami POSBAKUM, maka pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi mengenai layanan POSBAKUM ini, baik melalui media cetak maupun elektronik serta media-media lain yang relevan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, Jakarta: Sinar Grafik, 2003.
- Keputusan Tuada Uldilag MA RI dan Keputusan Sekretaris MA RI tentang *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SEMA 10/2010* berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Agama.
- Lev, Daniel S., *Islamic Court in Indonesia*, ter. Zaini Achmad Noeh, Jakarta: 1988.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.

- Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1994.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muktiarto, *Mahkamah Agung Yang Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Nasution, Adnan Buyung, "Hukum dan Kendala Pemerataan Keadilan", dalam Artijo Alkostar ed., et.al., *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Positif Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Nations, United, *Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Gramedia, 2011.

## **B. Jurnal**

*Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun II, Desember 1973.

## **C. Wawancara**

Wawancara dengan Drs. H. Musahadi, M.Ag. Direktur Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada hari Senin, 12 Desember 2011.

Wawancara dengan bapak Mahendra, SH. Penssek Pengadilan Agama Brebes, tanggal 28 Desember 2011.

Wawancara dengan Soleh, petugas pelayanan jasa POSBAKUM di PA Brebes Jawa Tengah.

Wawancara dengan Ashari, S.Ag salah satu petugas POSBAKUM dari LPKBHI Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 8 Desember 2011.

Wawancara dengan Novita Dewi Masyitho, SH, MH, petugas POSBAKUM LPKBHI Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang di Kantor pada tanggal 2 Desember 2011.

## **D. Dokumen**

Perundang-undangan di Indonesia

Pejelasan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49;



Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011.

Data bersumber dari laporan pelaksanaan LBH Brebes Tahun 2011.

Data diambil dari laporan tahunan Pengadilan Agama Semarang tahun 2011

#### E. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/> diakses tanggal 24 Januari 2011.

<http://www.detiknews.com> diunduh pada hari Sabtu, 21 Januari 2012.

[www.padumai.net](http://www.padumai.net), Jum'at, 16 Desember 2011.

<http://www.pt-palangkaraya.net>

<http://www.digilib.ui.ac.id>

## LAMPIRAN

### PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN TONJONG DESA RAJAWETAN

Alamat : Rajawetan - Kec. Tonjong - Kab. Brebes Kode Pos 52272

#### SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor : 075.2/22/11/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rajawetan Kec. Tonjong Kab. Brebes menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : WASITAH  
 Bin / Binti : MARYOTO  
 Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi 12-2-1982  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan : TANI  
 Alamat : RAJAWETAN RT03 RW04

Bahwa orang tersebut di atas adalah benar-benar warga Desa kami yang tergolong tidak mampu untuk biaya dalam pengajuan perkawinan PERCERAHAN

Di Pengadilan Agama Kelas I A Brebes terhadap

Nama : NISAUN  
 Bin / Binti : NISMAO  
 Tempat / Tanggal Lahir : Tegal 20-7-1980  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan : TANI  
 Alamat : Campak Bumiayu Tegal  
 Keterangan : Mohon dibebaskan dari biaya pertanggung di PA Brebes

Dengan ini Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kemudian agar dipergunakan sebagaimana

Rajawetan, 2 Januari 2011

Tanda Tangan Pemegang

Kepala Desa Rajawetan

WASITAH



## SURAT PERNYATAAN

Kepada

Yth. : Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes  
di  
Brebes

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WASDAL  
Umur : .....  
Tempat/tanggal lahir : BREBES 12-2-1982  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Pendidikan : TIAH KULON SD  
Pekerjaan : SALUSIA  
Alamat : RT. RAYUNTA M. BABAKAN RT. 05  
Kec. JONGJONG Kab. BREBES JAWA BARU

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mampu membuat surat gugatan/permohonan dan juga tidak mampu membayar advokat.

Oleh karena itu saya mohon kepada Pos Bantuan Hukum yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Brebes dapat membantu membuat surat gugatan/permohonan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.

Brebes, 01-12-2011

Pemohon

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Pengadilan Agama Brebes

(WASDAL)

Drs. H. Marykurin Hamid, S.H., M.Si

NID. 1000004 100000 10118



### SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : W. S. H.  
Tempat tanggal lahir : Brebes 13-2-1982  
Jenis kelamin : Pemria  
Pendidikan : SD Sakinah / Negeri Lulus  
Pekerjaan : Swasti  
Alamat : Des. Rejanidan Rt. Babakan RT. 04/05  
Kec. Jayong Kab. Brebes Jateng

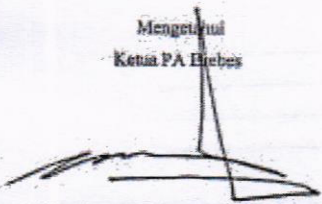
Menyatakan bahwa saya tidak mampu untuk membayar biaya Jasa Bantuan Hukum, sehubungan dengan Permohonan / Gugatan Cedai ..... di PA Brebes.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh layanan jasa di bidang hukum dari Posbakum yang berada di PA Brebes sesuai dengan ketentuan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 20 huruf (c) tanggal .....

Brebes, 01-12-2011

Mengetahui  
Kena PA Brebes

Pemohon

  
Dra. H. Masykurin Hamid, S.H., M.Si  
NIP : 19540504 198393 1 018

(W. S. H.)

pada Yth :  
Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah Brebes  
di-

BREBES

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIASIAH  
Tempat tanggal lahir : Brebes 13.2.1985  
Jenis kelamin : Pearempuan  
Pendidikan : D3. ILMU ISLAM  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : Des. Ayanatan Dh. Kalakan Ridwan RT. 12.01  
Kec. Tanjung Kab. Brebes JALANG

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan jasa bantuan hukum yang berada POSBAKUM Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Brebes sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. SKTM
2. Surat pernyataan
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Brebes saya ucapkan terima kasih

Brebes, 1 Desember 2011

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pemohon

X  
( Riasiah )





Perihal : **PERMOHONAN PELAYANAN POSBAKUM**

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang  
di-  
Semarang

*Assalamu alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

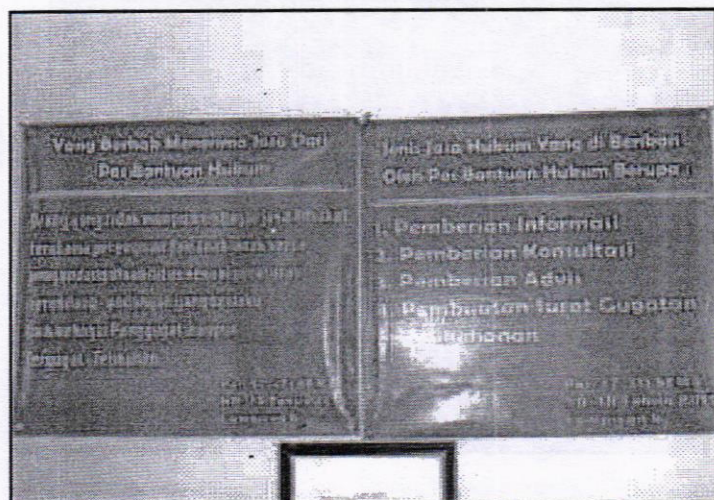
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan jasa bantuan hukum yang berada di POSBAKUM Pengadilan Agama Semarang sebagai bahan pertimbangan. Bersama ini saya lampirkan:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas Perkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang, saya ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu alaikum wr. wb.*

Semarang, Desember 2011

Pemohon











# STUDI EVALUATIF

## *Pelaksanaan*

### **POS BANTUAN HUKUM**

### **(POSBAKUM)**

DI PENGADILAN AGAMA  
DI JAWA TENGAH



Kebijakan negara dalam pembangunan hukum memberi penekanan pada semakin pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Concern pembangunan hukum yang berorientasi pada pemerataan keadilan tersebut ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai UU dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.